

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Menyusun Laporan Keuangan Daerah Dinkopumdag YA 2023 Kabupaten Brebes selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi.

Tujuan umum Laporan Keuangan SKPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
- 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan ini terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran ;
- b) Neraca ;
- c) Laporan Operasional ;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Transfer ;
- d) Surplus/Defisit ;
- e) Pembiayaan ;
- f) Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran

Neraca

Neraca Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Kami mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Kami mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima kembali atau dibayar kembali dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas ;
- b) Investasi jangka pendek ;
- c) Piutang pajak dan bukan pajak ;
- d) Persediaan ;
- e) Investasi jangka panjang ;
- f) Aset tetap ;
- g) Kewajiban jangka pendek ;
- h) Kewajiban jangka panjang ;
- i) Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- b) Beban dari Kegiatan Operasional;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- d) Surplus/defisit-LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Bupati Brebes Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 133 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan disusun adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD	
	3.1	LRA
		3.1.1 Pendapatan_LRA
		3.1.2 Belanja
	3.2	LO
		3.2.1 Pendapatan –LO
		3.2.2 Beban
		3.2.3 Kegiatan Non Operasional
		3.2.4 Pos Luar Biasa
	3.3	Laporan Perubahan Ekuitas
		3.3.1 Perubahan Ekuitas
	3.4	Neraca
		3.4.1 Aset

Bab I	Pendahuluan		
		3.4.2	Kewajiban
		3.4.3	Ekuitas
	3.5	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada Pemda.	
	3.6	Laporan Arus Kas BLUD	
	3.7	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD	
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD		
Bab V	Penutup		

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

Untuk memberikan gambaran secara jelas ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel bawah ini :

1. *Tabel pencapaian target dan realisasi pendapatan*

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Pendapatan Asli Daerah	7,025,000,000.00	5,993,068,300.00	(1,031,931,700.00)	85.31 %
2	Pendapatan Transfer	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	JUMLAH PENDAPATAN	7,025,000,000.00	5,993,068,300.00	(1,031,931,700.00)	85.31 %

Dengan rincian sebagai berikut :

a. **Pendapatan Asli Daerah**

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1	Pajak Daerah	7,025,000,000.00	5,993,068,300.00	(1,031,931,700.00)	85.31%
2	Retribusi Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Lain-lain PAD yang Sah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah PAD	7,025,000,000.00	5,993,068,300.00	(1,031,931,700.00)	85.31%

b. Pendapatan Transfer

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA BERIMBANGAN	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
1	Dana Bagi Hasil Pajak	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Dana Alokasi Umum	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Dana Alokasi Khusus	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
1	Dana Otonomi Khusus	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Dana Penyesuaian	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah Pendapatan Transfer	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
1	Pendapatan Hibah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Pendapatan Dana Darurat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Pendapatan Lain-lain	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Kinerja mengenai anggaran pendapatan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi pendapatan sebesar Rp. 5,993,068,300.00 dari target yang ditetapkan Rp7,025,000,000.00 atau 85.31%.
- 2) Realisasi pendapatan Rp1,031,931,700.00 kurang dari anggaran.

2. *Tabel pencapaian target dan realisasi belanja*

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Belanja Pegawai	11,022,971,010.00	10,056,080,934.00	966,890,076.00	91.23
2	Belanja Barang dan Jasa	5,342,259,722.00	5,196,385,927.00	145,873,795.00	97.27
3	Belanja Modal	578,525,000.00	576,702,000.00	1,823,000.00	99.68
4	Belanja Bantuan Sosial	96,000,000.00	96,000,000.00	0	100
	Jumlah	17,039,755,732.00	15,925,168,861.00	1,114,586,871.00	93.46

Kinerja mengenai anggaran belanja dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp11,022,971,010.00 dari anggaran yang ditetapkan Rp10,056,080,934.00 atau 91.23%.
- b. Realisasi Belanja Barang Jasa sebesar Rp5,196,385,927.00 dari anggaran yang ditetapkan Rp5,342,259,722.00 atau 97.27%.
- c. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp576,702,000.00 dari anggaran yang ditetapkan Rp578,525,000.00 atau 99.68%.
- d. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Rp96,000,000.00 dari anggaran yang ditetapkan RP.96,000,000.00 atau 100%

Secara keseluruhan realisasi belanja mencapai 93.46% dari yang dianggarkan.

3. *Tabel pencapaian target dan realisasi pembiayaan (khusus SKPKD)*a. *Penerimaan Pembiayaan*

NO	URAIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Pencairan Dana Cadangan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Kinerja mengenai anggaran penerimaan pembiayaan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi SILPA sebesar Rp NIHIL dari anggaran yang ditetapkan Rp NIHIL atau NIHIL %.
- 2) Realisasi Pencairan Dana Cadangan sebesar RpNIHIL dari anggaran yang ditetapkan Rp NIHIL atau NIHIL %.
- 3) Realisasi Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan Rp NIHIL atau NIHIL %.
- 4) Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp NIHIL dari anggaran yang ditetapkan Rp NIHIL atau NIHIL %.
- 5) Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp NIHIL dari anggaran yang ditetapkan Rp NIHIL atau NIHIL %.
- 6) Realisasi Penerimaan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan sebesar Rp NIHIL dari anggaran yang ditetapkan Rp NIHIL atau NIHIL %.

Secara keseluruhan realisasi penerimaan pembiayaan mencapai NIHIL % dari yang dianggarkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

NO	URAIAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Pembentukan Dana Cadangan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Penyertaan Modal Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Pemberian Pinjaman Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Kinerja mengenai anggaran pengeluaran pembiayaan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp NIHIL dari anggaran yang ditetapkan Rp NIHIL atau NIHIL %.
- 2) Realisasi Penyertaan Modal sebesar Rp NIHIL dari anggaran yang ditetapkan Rp atau NIHIL %.
- 3) Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp NIHIL dari anggaran yang ditetapkan Rp NIHIL atau %.

- 4) Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp NIHIL dari anggaran yang ditetapkan Rp NIHIL atau NIHIL %.
- 5) Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp NIHIL dari anggaran yang ditetapkan Rp NIHIL atau NIHIL %.

Secara keseluruhan realisasi pengeluaran pembiayaan mencapai NIHIL % dari yang dianggarkan.

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

.....

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh daerah. Ikhtisar Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7,025,000,000.00	5,993,068,300.00	85.31%	5,861,954,600.00
b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	7,025,000,000.00	5,993,068,300.00	85.31%	5,861,954,600.00

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2022, maka realisasi pendapatan yang dikelola Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes Tahun 2023 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 5,993,068,300 atau 85.31%.

Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp7,025,000,000.00 Realisasi sebesar Rp5,993,068,300 atau 85.31%.. Realisasi secara rinci dengan komposisi sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Pajak Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Retribusi daerah	7,025,000,000.00	5,993,068,300.00	85.31%	5,861,954,600.00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d. Lain-Lain PAD yang sah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	7,025,000,000.00	5,993,068,300.00	85.31%	5,861,954,600.00

a. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi pendapatan dari pajak daerah kurang/melebihi target sebesar NIHIL atau realisasi mencapai Rp NIHIL.

Realisasi secara rinci dapat dirinci sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Pajak Hotel	NIHIL	NIHIL	NIHI L	NIHIL
Pajak Restoran	NIHIL	NIHIL	NIHI L	NIHIL
Pajak Hiburan	NIHIL	NIHIL	NIHI L	NIHIL
Pajak Reklame	NIHIL	NIHIL	NIHI L	NIHIL
Pajak Penerangan Jalan	NIHIL	NIHIL	NIHI L	NIHIL
Pajak Parkir	NIHIL	NIHIL	NIHI L	NIHIL
Pajak Air Tanah	NIHIL	NIHIL	NIHI L	NIHIL
Pajak Sarang Burung Walet	NIHIL	NIHIL	NIHI L	NIHIL
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	NIHIL	NIHIL	NIHI L	NIHIL
Pajak Bumi dan Bangunan	NIHIL	NIHIL	NIHI L	NIHIL
Pajak Lingkungan	NIHIL	NIHIL	NIHI L	NIHIL
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	NIHIL	NIHIL	NIHI L	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHI L	NIHIL

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah yang dikelola Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes dapat terealisasi Rp 5,993,068,300.00 atau 85.31% dari target sebesar Rp NIHIL sebagaimana rincian berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Retribusi Jasa Umum	75,000,000.00	116,008,000.00	154.68	107,971,000.00
Retribusi Jasa Usaha	6,950,000,000.00	5,877,060,300.00	84.56	5,753,983,600.00
Retribusi Perizinan Tertentu	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	7,025,000,000.00	5,993,068,300.00	85.31	5,861,954,600.00

Realisasi secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Pelayanan Kesehatan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Pelayanan Pasar	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	75,000,000.00	116,008,000.00	154.68	107,971,000.00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Pelayanan Kependudukan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	75,000,000.00	116,008,000.00	154.68	107,971,000.00

2) Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	6,950,000,000.00	5,877,060,300.00	84.56	5,753,983,600.00
Retribusi Tempat Pelelangan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Terminal	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Tempat Khusus Parkir	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Rumah Potong Hewan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Penyeberangan di Air	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	6,950,000,000.00	5,877,060,300.00	84.56	5,753,983,600.00

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Retribusi Perizinan Tertentu				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Izin Usaha Perikanan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp NIHIL dari yang direncanakan sebesar Rp NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Rincian bagian laba sebagai berikut :

Nama BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta	Realisasi 2023
PT. Bank Jateng	NIHIL
PD Bank Brebes	NIHIL
BKK Banjarharjo	NIHIL
BKK Jateng	NIHIL
PD Air Minum Tirta Husada (PDAM)	NIHIL
PD Percetakan	NIHIL
PD Farmasi	NIHIL

PRPP	NIHIL
Jumlah	NIHIL

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sebesar Rp NIHIL dari yang direncanakan sebesar Rp NIHIL atau NIHIL % dengan rincian sebagai berikut :

Lain-Lain PAD yang Sah :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Hasil Penjualan BMD Yang Tdk Dipisahkan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Hasil Kerja Sama Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jasa Giro Kas Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pendapatan Bunga	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pendapatan Denda Pajak Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pendapatan dari Pengembalian	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pendapatan BLUD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp NIHIL Realisasi sebesar Rp NIHIL atau NIHIL %. Realisasi secara rinci dengan sebagai berikut:

Pendapatan Transfer :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pendapatan Transfer Antar Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Dana Perimbangan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Dana Insentif Daerah (DID)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Dana Keistimewaan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Dana Desa	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan :

- 1) Dana Perimbangan tahun 2023 berupa :
 - DTU-Dana Bagi Hasil sebesar Rp NIHIL
 - DTU-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp NIHIL
 - DTU-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp NIHIL
 - DTU-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp NIHIL
- 2) Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp
- 3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp NIHIL
- 4) Dana Keistimewaan sebesar Rp NIHIL
- 5) Dana Desa sebesar Rp NIHIL
 - Rincian penerimaan Dana Desa per Desa sesuai lampiran NIHIL

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Pendapatan Bagi Hasil	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Bantuan Keuangan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
---------------	-------	-------	-------	-------

Penjelasan :

- 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi berupa :
 - a) Bagi Hasil Pajak NIHIL sebesar Rp NIHIL
 - b) Bagi Hasil Pajak NIHIL. sebesar Rp NIHIL
 - c) Bagi Hasil Pajak NIHIL sebesar Rp NIHIL
- 2) Pendapatan Bantuan Keuangan berupa :
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp NIHIL
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp NIHIL

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp NIHIL Realisasi sebesar Rp NIHIL atau NIHIL %. Realisasi secara rinci dengan sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Pendapatan Hibah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Dana Darurat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan :

- 1) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat berupa NIHIL sebesar Rp NIHIL
- 2) Pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya berupa NIHIL sebesar Rp NIHIL
- 3) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri berupa NIHIL sebesar Rp NIHIL

- 4) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri berupa NIHIL sebesar Rp NIHIL
- 5) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis berupa NIHIL sebesar Rp NIHIL

b. Dana Darurat

Dana Darurat berupa NIHIL dianggarkan sebesar Rp NIHIL terealisasi sebesar Rp NIHIL atau NIHIL %

Dana Darurat :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Dana Darurat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Pendapatan Hibah Dana BOS	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan :

- 1) Pendapatan Dana BOS berupa :
 - a) BOS Reguler sebesar Rp NIHIL
 - b) BOS Afiriasi sebesar Rp NIHIL
 - c) BOS Kinerja sebesar Rp NIHIL
- 2) Pendapatan atas Pengembalian Hibah berupa NIHIL sebesar Rp NIHIL

3.1.2 Belanja

Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2023 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran sebesar Rp 15,925,168,861.00 dari anggaran Rp17,039,755,732.00 dengan perincian sebagai berikut :

Belanja :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Operasi	16,461,230,732.00	15,348,466,861.00	93.24	16,326,454,793.00
b. Belanja Modal	578,525,000.00	576,702,000.00	99.68	
c. Belanja Tak Terduga	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d. Belanja Transfer	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	17,039,755,732.00	15,925,168,861.00	93.46	16,326,454,793.00

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Dalam Tahun Anggaran 2023 Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes merealisasikan belanja operasi sebesar Rp15,348,466,861 dari anggaran sebesar Rp16,461,230,732.00 Komposisi realisasi belanja operasi sebagai berikut :

Belanja Operasi :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	11,022,971,010.00	10,056,080,934.00	91.23	9,929,355,944.00
Belanja Barang dan Jasa	5,342,259,722.00	5,196,385,927.00	97.27	5,957,298,849.00
Belanja Bunga	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Belanja Subsidi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Belanja Hibah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	30,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial	96,000,000.00	96,000,000.00	1.00	409,800,000.00
Jumlah	16,461,230,732.00	15,348,466,861.00	93.24	16,326,454,793.00

a. Rincian/penjelasan Belanja Pegawai sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a Gaji dan Tunjangan	7,055,735,010.00	6,469,321,741.00	91.69	6,645,595,475.00
b Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3,623,256,000.00	3,340,583,558.00	92.20	3,091,121,729.00
c Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
e Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
f Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
g Belanja Pegawai BOS	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
h Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	343,980,000.00	246,175,635.00	71.57	192,638,740.00
Jumlah	11,022,971,010.00	10,056,080,934.00	91.23	9,736,717,204.00

- 1) Belanja Pegawai BOS sebesar Rp NIHIL terdiri dari :
 - a) Belanja Pegawai BOS pada Satdikdas sebesar Rp NIHIL
 - b) Belanja Pegawai BOS pada Satdikmen sebesar Rp NIHIL
- 2) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp NIHIL terdiri dari :

(untuk BLUD RSUD penjelasan disesuaikan)

 - a) Puskesmas NIHIL sebesar Rp NIHIL
 - b) Puskesmas NIHIL sebesar Rp NIHIL
 - c) Puskesmas NIHIL sebesar Rp NIHIL
 - d) Puskesmas NIHIL sebesar Rp NIHIL
 - e) Puskesmas NIHIL sebesar Rp NIHIL
 - f) Puskesmas NIHIL sebesar Rp NIHIL

b. Rincian/penjelasan Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Barang	660,096,122.00	653,035,180.00	98.93	591,205,911.00
b. Belanja Jasa	3,780,606,000.00	3,712,216,078.00	98.19	4,433,203,867.00
c. Belanja Pemeliharaan	224,698,600.00	224,435,000.00	99.88	6,885,000.00
d. Belana Perjalanan Dinas	676,859,000.00	670,265,669.00	99.03	870,305,771.00
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
f. Belanja Barang dan Jasa BOS	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
J u m l a h	5,342,259,722.00	5,259,951,927.00	98.46	5,901,600,549.00

1) Belanja Barang merupakan belanja barang persediaan sesuai rincian sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Barang Pakai Habis	660,096,122.00	653,035,180.00	98.93	591,205,911.00
b. Belanja Barang Tak Habis Pakai	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Belanja Barang Bekas Dipakai	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
J u m l a h	660,096,122.00	653,035,180.00	98.93	591,205,911.00

Penjelasan :

Rincian Belanja Barang Pakai Habis disajikan pada lampiran 3.1.1

2) Belanja Jasa sebesar Rp 3,712,216,078.00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Jasa :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Jasa Kantor	3,674,518,000	3,611,449,034	98.28	3,302,515,272.00
b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	29,588,000.00	26,769,044.00	90.47	12,959,595.00
c. Belanja Sewa Tanah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13,000,000.00	12,330,000.00	94.85	190,800,000.00
e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13,500,000.00	12,000,000.00	88.89	
f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50,000,000.00	49,668,000.00	99.34	747,829,000.00

Belanja Jasa :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	179,100,000.00
m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
J u m l a h	3,780,606,000.00	3,712,216,078.00	98.19	4,433,203,867.00

3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp224,435,000.00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pemeliharaan :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Pemeliharaan Tanah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60,491,600.00	60,327,000.00	99.73	6,885,000.00
c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	158,207,000.00	158,108,000.00	99.94	55,698,300.00
e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	NIHIL
J u m l a h	224,698,600.00	224,435,000.00	99.88	6,885,000.00

4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp670,265,669.00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	676,859,000.00	670,265,669.00	99.03	870,305,771.00
b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
J u m l a h	676,859,000.00	670,265,669.00	99.03	870,305,771.00

- 5) Belanja Uang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Uang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masy :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
J u m l a h	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

- 6) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp NIHIL terdiri dari :

Belanja Barang dan Jasa BOS :	Realisasi 2023
a. Belanja Barang dan Jasa Satdikdas	NIHIL
b. Belanja Barang dan Jasa Satdikmen	NIHIL
J u m l a h	NIHIL

- 7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp NIHIL terdiri dari :
(*untuk BLUD RSUD penjelasan disesuaikan*)

Belanja Barang dan Jasa BLUD :	Realisasi 2023
a. Puskesmas	NIHIL
b. Puskesmas	NIHIL
c. Puskesmas	NIHIL
d. Puskesmas	NIHIL
e. Puskesmas	NIHIL
f. Puskesmas	NIHIL
J u m l a h	NIHIL

- c. Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Bunga :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b.	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c.	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d.	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
e.	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
f.	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
J u m l a h		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan :

- 1) Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank merupakan bunga atas pinjaman NIHIL dibayarkan kepada Lembaga Keuangan Bank NIHIL sebesar Rp NIHIL
- 2) Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan bunga atas pinjaman NIHIL dibayarkan kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank NIHIL sebesar Rp NIHIL
- 3) Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD merupakan bunga atas pinjaman BLUD untuk NIHIL yang dibayarkan kepada Lembaga Keuangan Bank NIHIL sebesar Rp NIHIL

d. Realisasi belanja Subsidi adalah NIHIL

e. Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Hibah :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Belanja Hibah kepada BUMN	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d. Belanja Hibah kepada BUMD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
e. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
f. Belanja Hibah Dana BOS	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
g. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
J u m l a h	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan :

- 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan dalam bentuk :

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
--	----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------

a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
J u m l a h	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Rincian Barang Hibah kepada Pemerintah Pusat disampaikan pada **lampiran 3.1.2**

2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya diberikan dalam bentuk :

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
J u m l a h	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Rincian Barang Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya disampaikan pada **lampiran 3.1.2**

3) Belanja Hibah kepada BUMN diberikan dalam bentuk :

Belanja Hibah kepada BUMN :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Hibah Uang kepada BUMN	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Belanja Hibah Barang kepada BUMN	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Belanja Hibah Jasa kepada BUMN	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
J u m l a h	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Rincian Barang Hibah kepada BUMN disampaikan pada **lampiran 3.1.2**

4) Belanja Hibah kepada BUMD diberikan dalam bentuk :

Belanja Hibah kepada BUMD :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Hibah Uang kepada BUMD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Belanja Hibah Barang kepada BUMD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Belanja Hibah Jasa kepada BUMD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
J u m l a h	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Rincian Barang Hibah kepada BUMD disampaikan pada **lampiran 3.1.2**

5) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang

Berbadan Hukum Indonesia diberikan dalam bentuk :

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d. Belanja Hibah kepada Koperasi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
J u m l a h	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Rincian Barang Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia disampaikan pada **lampiran 3.1.2**

- 6) Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp NIHIL diberikan kepada satdikdas negeri serta satdikdas, satdikmen dan satdiksus swasta sesuai **lampiran 3.1.3**
- 7) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp NIHIL terealisasi sebesar Rp NIHIL atau NIHIL %. Rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Nama Partai	Realisasi 2023 (Rp)
a. Partai ...	NIHIL
b. Partai ...	NIHIL
c. Partai ...	NIHIL
d. Partai ...	NIHIL
J u m l a h	NIHIL

- f. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Bantuan Sosial :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	96,000,000.00	96,000,000.00	100.00	264,800,000.00
b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	145,000,000.00
d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Belanja Bantuan Sosial :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
J u m l a h	96,000,000.00	96,000,000.00	100.00	409,800,000.00

Penjelasan :

- 1) Belanja Bantuan Sosial kepada individu diberikan dalam bentuk :
 - a. Uang, merupakan uang yang bersumber dari DAK-NF KOP sebesar Rp 96,000,000,00
 - b. Barang, merupakan bantuan sosial NIHIL sebesar Rp NIHIL
Rincian Barang Bantuan Sosial kepada Individu disampaikan pada **lampiran 3.1.4**
- 2) Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga diberikan dalam bentuk :
 - a. Uang, merupakan uang NIHIL sebesar Rp NIHIL
 - b. Barang, merupakan bantuan sosial NIHIL sebesar Rp NIHIL
Rincian Barang Bantuan Sosial kepada keluarga disampaikan pada **lampiran 3.1.4**
- 3) Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat diberikan dalam bentuk :
 - a. Uang, merupakan uang NIHIL sebesar Rp NIHIL
 - b. Barang, merupakan bantuan sosial NIHIL sebesar Rp NIHIL
Rincian Barang Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat disampaikan pada **lampiran 3.1.4**
- 4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya diberikan dalam bentuk :
 - a. Uang, merupakan uang NIHIL sebesar Rp NIHIL
 - b. Barang, merupakan bantuan sosial NIHIL sebesar Rp NIHIL
Rincian Barang Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya disampaikan pada **lampiran 3.1.4**

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa pengeluaran untuk perolehan aset tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya serta belanja modal aset tidak berwujud. Realisasi belanja modal dalam Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp576,702,000.00 dari anggaran sebesar Rp578,525,000.00 dengan rincian:

Belanja Modal :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Modal Tanah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28,525,000.00	28,300,000.00	99.21	NIHIL
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	550,000,000.00	548,402,000.00	99.71	3,955,505,233.00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Belanja Modal :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
g. Belanja Modal Aset Lainnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	578,525,000.00	576,702,000.00	99.68	3,955,505,233.00

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah sebesar Rp NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal Tanah :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Modal Tanah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Belanja Modal Tanah BLUD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan :

- 1) Belanja Modal Tanah meliputi :
 - a) Tanah NIHIL sebesar Rp NIHIL
 - b) Tanah NIHIL sebesar Rp NIHIL
 - c) Tanah NIHIL sebesar Rp NIHIL
- 2) Belanja Modal Tanah BLUD meliputi :
 - a) Tanah NIHIL sebesar Rp NIHIL
 - b) Tanah NIHIL sebesar Rp NIHIL
 - c) Tanah NIHIL sebesar Rp NIHIL

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 28,300,000.00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Peralatan dan Mesin :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Modal Alat Besar	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Belanja Modal Alat Angkutan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d. Belanja Modal Alat Pertanian	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	24,525,000.00	24,300,000.00	99.08	NIHIL
f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	NIHIL
g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
h. Belanja Modal Alat Laboratorium	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Belanja Peralatan dan Mesin :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
i. Belanja Modal Komputer	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
j. Belanja Modal Alat Eksplorasi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
k. Belanja Modal Alat Pengeboran	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
l. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
m. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
n. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
o. Belanja Modal Alat Peraga	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
p. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
q. Belanja Modal Rambu-Rambu	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
r. Belanja Modal Peralatan Olahraga	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
s. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
t. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	28,525,000.00	28,300,000.00	99.21	NIHIL

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp548,402,000.00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Gedung dan Bangunan :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Modal Bangunan Gedung	550,000,000.00	548,402,000.00	99.71	3,955,505,233.00
b. Belanja Modal Monumen	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Belanja Modal Bangunan Menara	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	550,000,000.00	548,402,000.00	99.71	3,955,505,233.00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b.	Belanja Modal Bangunan Air	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c.	Belanja Modal Instalasi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d.	Belanja Modal Jaringan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
e.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

	Belanja Aset Tetap Lainnya :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c.	Belanja Modal Hewan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d.	Belanja Modal Biota Perairan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
e.	Belanja Modal Tanaman	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
f.	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
g.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
h.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
i.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
j.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3. Belanja Tak Terduga (khusus untuk SKPKD)

Belanja Tak Terduga adalah belanja yang dialokasikan untuk penanganan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Realisasi belanja tak terduga dalam Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp NIHIL dari anggaran sebesar Rp NIHIL .

Belanja Tidak Terduga :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Belanja Tak Terduga	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penggunaan Belanja Tak Terduga meliputi :

- a. Penggunaan untuk penanganan COVID-19 dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian BTT COVID-19	Realisasi 2023
1	NIHIL	NIHIL
2	NIHIL	NIHIL
3	NIHIL	NIHIL
4	NIHIL	NIHIL
5	NIHIL	NIHIL
6	NIHIL	NIHIL
7	NIHIL	NIHIL
8	NIHIL	NIHIL
9	NIHIL	NIHIL
10	NIHIL	NIHIL
	Jumlah	NIHIL

- b. Penggunaan untuk penanganan darurat bencana dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian BTT Darurat Bencana :	Realisasi 2023
1	NIHIL	NIHIL
2	NIHIL	NIHIL
3	NIHIL	NIHIL
4	NIHIL	NIHIL
5	NIHIL	NIHIL
6	NIHIL	NIHIL
7	NIHIL	NIHIL
8	NIHIL	NIHIL
9	NIHIL	NIHIL
10	NIHIL	NIHIL
	Jumlah	NIHIL

- c. Penggunaan untuk pengembalian pendapatan tahun sebelumnya dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian BTT Pengembalian Pendapatan :	Realisasi 2023
1	NIHIL	NIHIL
2	NIHIL	NIHIL
3	NIHIL	NIHIL
4	NIHIL	NIHIL
5	NIHIL	NIHIL
6	NIHIL	NIHIL
7	NIHIL	NIHIL
8	NIHIL	NIHIL
9	NIHIL	NIHIL

10	NIHIL	NIHIL
	Jumlah	NIHIL

4. Belanja Transfer (khusus untuk SKPKD)

Belanja Transfer merupakan transfer bagi hasil ke desa yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi dan bantuan keuangan. Realisasi Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp NIHIL dari anggaran sebesar Rp .

Belanja Transfer :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Bagi Hasil	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Belanja Bantuan Keuangan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa, dijelaskan sesuai tabel berikut :

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, dijelaskan sesuai tabel berikut :

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPKD)

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp NIHIL dijelaskan sesuai tabel berikut :

Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Pencairan Dana Cadangan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut :

- SiLPA tahun sebelumnya terealisasi sebesar Rp NIHIL
- Pencairan Dana Cadangan terealisasi sebesar Rp NIHIL merupakan dana cadangan untuk pembangunan NIHIL
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp NIHIL merupakan penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD NIHIL
- Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp NIHIL merupakan pinjaman kepada NIHIL untuk keperluan NIHIL dengan jangka waktu NIHIL
- Penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar Rp NIHIL merupakan penerimaan atas pokok piutang dana bergulir pada SKPD dengan rincian sesuai tabel berikut :

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah :	Realisasi 2023
a. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan	NIHIL
b. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	NIHIL
c. Dinas Peternakan	NIHIL
d. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	NIHIL
Jumlah	NIHIL

- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp NIHIL merupakan NIHIL

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp NIHIL dijelaskan sesuai tabel berikut :

Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Pembentukan Dana Cadangan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Penyertaan Modal Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d. Pemberian Pinjaman Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Dana Cadangan terealisasi sebesar Rp NIHIL merupakan dana cadangan untuk pembangunan NIHIL
- b. Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp NIHIL merupakan penyertaan modal kepada BUMD dengan rincian sebagai berikut :

Penyertaan Modal Daerah :	Realisasi 2023
a. PT Bank Jateng Cabang Brebes	NIHIL
b. BKK Jateng	NIHIL
c. BKK Brebes	NIHIL
d. BKK Banjarharjo	NIHIL
e. Perumda BPR Bank Brebes	NIHIL
f. Perumda Air Minum Tirta Baribis (PDAM)	NIHIL
g. Perusda Percetakan Puspa Grafika	NIHIL
h. dst ...	NIHIL
Jumlah	NIHIL

- c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp NIHIL merupakan pembayaran atas pokok pinjaman kepada NIHIL untuk keperluan NIHIL dengan jangka waktu NIHIL
 - d. Pemberian pinjaman daerah sebesar Rp NIHIL merupakan pemberian atas investasi NIHIL
 - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp NIHIL merupakan NIHIL
3. **Pembiayaan Netto**

Pembiayaan netto merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Terealisasi sebesar Rp NIHIL dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp NIHIL atau NIHIL %. Rinciannya dijelaskan pada tabel berikut :

Pembiayaan :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
---------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------

a. Penerimaan Pembiayaan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Pengeluaran Pembiayaan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pembiayaan Netto	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.2 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun. Laporan operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa.

3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Brebes yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2023 dan 2022.

Pendapatan-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp11,575,695,821.80 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Pendapatan-LO				
1. Pendapatan Asli Daerah – LO	6,040,622,537.80	5,919,574,476.79	121,048,061.01	2.04
2. Pendapatan Transfer – LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	5,535,073,284.00	-	5,535,073,284.00	100
Jumlah	11,575,695,821.80	5,919,574,476.79	5,656,121,345.01	95.55

1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2023 adalah sebesar Rp6,040,622,537.80 dengan rincian sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Pendapatan Asli Daerah-LO				
a. Pendapatan Pajak Daerah – LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	6,040,622,537.80	5,825,340,576.79	(215,281,961.01)	4
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d. Lain-lain PAD Yang Sah – LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	6,040,622,537.80	5,825,340,576.79	(215,281,961.01)	4

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – Lo adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Pendapatan Pajak Daerah – LO				
a Pajak Hotel-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b Pajak Restoran-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c Pajak Hiburan-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d Pajak Reklame-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
e Pajak Penerangan Jalan-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
f Pajak Parkir-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
g Pajak Air Tanah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
h Pajak Sarang Burung Walet-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
i Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
j Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
k Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
l Pajak Lingkungan - LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Pajak Retribusi Daerah - LO adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Pendapatan Retribusi Daerah – LO				
a Retribusi Jasa Umum-LO	6,040,622,537.80	5,825,340,576.79	(215,281,961.01)	4
b Retribusi Jasa Usaha-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c Retribusi Perizinan Tertentu-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	6,040,622,537.80	5,825,340,576.79	(215,281,961.01)	4

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO				

a	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

d. Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah – LO adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Lain-lain PAD yang Sah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d. Hasil Kerja Sama Daerah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
e. Jasa Giro-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
f. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
g. Pendapatan Bunga-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
h. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
i. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
j. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
k. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
l. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
m. Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
n. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
o. Pendapatan dari Pengembalian-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
p. Pendapatan dari BLUD-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
q. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
r. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
s. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
t. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
u. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
v. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
w. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
x. Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
y. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer – LO tahun 2023 adalah sebesar Rp dengan rincian sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Pendapatan Transfer – LO				
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d. Bantuan Keuangan - LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2023 adalah sebesar Rp sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO				
a. Pendapatan Hibah – LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Dana Darurat – LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Pendapatan Lainnya – LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

a. Rincian Pendapatan Hibah – LO :

Pendapatan hibah – LO dirinci sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Pendapatan Hibah – LO				
a. Pendapatan Hibah BEC	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Penerimaan Pabrik Gula	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Pendapatan Hibah Barang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d. Dst.....	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Rincian Dana Darurat
Dana Darurat tahun 2023 sebesar NIHIL

c. Rincian Pendapatan Lainnya - LO

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Pendapatan Lainnya – LO				
a. Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Dispensasi Kelebihan Muatan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Bantuan dari Pihak ke-3	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d. Tera Ulang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
e. Ijin Usaha Perkebunan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
f. Ijin Usaha Perikanan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
g. Bantuan Retribusi SP3 Kayu	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
h. Pendapatan Dana BOS	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
i. Dst....	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.2.2 Beban

Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Beban				
a. Beban Operasi	17,367,350,616.87	18,657,906,898.70	1,290,556,281.83	7%
b. Beban Transfer	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	17,367,350,616.87	18,657,906,898.70	1,290,556,281.83	7%

1. Rincian Beban Operasi sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
BEBAN OPERASI				
a. Beban Pegawai	10,140,996,773.00	9,893,947,636.00	(247,049,137.00)	-2%
b. Beban Persediaan	682,433,499.87	584,754,098.70	(97,679,401.17)	-17%
c. Beban Jasa	3,662,555,787.00	3,686,382,607.00	23,826,820.00	1%
d. Beban Pemeliharaan	224,435,000.00	62,583,300.00	(161,851,700.00)	-259%
e. Beban Perjalanan Dinas	670,265,669.00	870,305,771.00	200,040,102.00	23%
f. Beban Bunga	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
g. Beban Subsidi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
h. Beban Hibah	NIHIL	30,000,000.00	30,000,000.00	100%
i. Beban Bantuan Sosial	96,000,000.00	409,000,000.00	313,000,000.00	77%
j. Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,890,663,888.00	3,120,933,486.00	1,230,269,598.00	39%
k. Beban Penyisihan Piutang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
l. Beban Lain-lain	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	17,367,350,616.87	18,657,906,898.70	1,290,556,281.83	-38%

- a. Beban operasi tersebut termasuk di dalamnya beban yang berasal dari Belanja BLUD. Atas belanja BLUD tersebut telah dilakukan mapping ke masing-masing rincian beban sebagai berikut :

Mapping Beban BLUD :	Realisasi 2023 (Rp)
BEBAN OPERASI	
a. Beban Pegawai	NIHIL
b. Beban Persediaan	NIHIL
c. Beban Jasa	NIHIL
d. Beban Pemeliharaan	NIHIL
e. Beban Perjalanan Dinas	NIHIL
f. Beban Bunga	NIHIL
g. Beban Subsidi	NIHIL
h. Beban Hibah	NIHIL
i. Beban Bantuan Sosial	NIHIL
j. Beban Penyusutan dan Amortisasi	NIHIL
k. Beban Penyisihan Piutang	NIHIL
l. Beban Lain-lain	NIHIL
Jumlah	NIHIL

- b. Atas belanja BOS tersebut juga telah dilakukan mapping ke masing-masing rincian beban sebagai berikut :

Mapping Beban BOS		Realisasi 2023 (Rp)
BEBAN OPERASI		
a	Beban Pegawai	NIHIL
b	Beban Persediaan	NIHIL
c	Beban Jasa	NIHIL
d	Beban Pemeliharaan	NIHIL
e	Beban Perjalanan Dinas	NIHIL
f	Beban Bunga	NIHIL
g	Beban Subsidi	NIHIL
h	Beban Hibah	NIHIL
i	Beban Bantuan Sosial	NIHIL
j	Beban Penyusutan dan Amortisasi	NIHIL
k	Beban Penyisihan Piutang	NIHIL
l	Beban Lain-lain	NIHIL
Jumlah		NIHIL

c. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah TA 2023 sebesar Rp NIHIL , merupakan Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta termasuk di dalamnya Beban Barang-barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat. Beban hibah yang dicatat adalah sesuai nilai barang yang diserahkan sebesar Rp NIHIL . Rekap Mutasi Barang yang dihibahkan kepada pihak ke-3 sebagai berikut :

Saldo 2022		Pengadaan 2023		Dihibahkan 2023		Reklasifikasi AT		Sisa 2023	
Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan aset tetap tahun 2023 adalah sebesar Rp NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|----------|
| a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | Rp NIHIL |
| b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | Rp NIHIL |
| c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp NIHIL |
| d. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | Rp NIHIL |

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2023 berupa amortisasi software sebesar Rp NIHIL Rincian Beban Amortisasi dan Akumulasi Amortisasi tahun 2023 sebagai berikut :

Nama Software	Umu r s.d 2023	Nilai Software (Rp)	Amortisasi per tahun (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2022 (Rp)	Beban Amortisasi 2023 (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp NIHIL, terdiri dari :

Beban Penyisihan Piutang :	Nilai (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	NIHIL
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	NIHIL
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan	NIHIL
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	NIHIL
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	NIHIL
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	NIHIL
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	NIHIL
Jumlah	NIHIL

2. Rincian Beban Transfer disampaikan sebagaimana tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan / (Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
a. Beban Bagi Hasil	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Beban Bantuan Keuangan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

a. Beban Bagi Hasil

Uraian	Realisasi		Kenaikan / (Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Beban Bagi Hasil				
a. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
---------------	-------	-------	-------	-------

b. Beban Bantuan Keuangan

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Beban Bantuan Keuangan				
a. Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d. Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
e. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
f. Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
g. Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3. Beban Tak Terduga tahun 2023 sebesar Rp NIHIL , adapun rincian penggunaan beban tak terduga adalah :
- Penggunaan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp NIHIL
 - Penggunaan untuk darurat bencana sebesar Rp NIHIL
 - Penggunaan untuk pengembalian pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp NIHIL
- Penggunaan secara rinci telah disampaikan pada penjelasan Belanja Tak Terduga.

3.2.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
SURPLUS NON OPERASIONAL – LO				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	NIHIL	1,029,800.00	NIHIL	NIHIL
JUMLAH	NIHIL	1,029,800.00	NIHIL	NIHIL
DEFISIT NON OPERASIONAL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	23,920,226.00	6,054,571.00	17,865,655.00	295%
JUMLAH	23,920,226.00	6,054,571.00	17,865,655.00	295%
SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL – LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

1. Surplus Non Operasional

Secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	
1	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	NIHIL
2	Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	NIHIL
3	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO	NIHIL
4	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	NIHIL
	Jumlah	NIHIL
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	
1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	NIHIL
2	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	NIHIL
3	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	NIHIL
4	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO	NIHIL
5	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	NIHIL
	Jumlah	NIHIL
	Total	NIHIL

Penjelasan :

a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO

Pada tahun 2023 dilaksanakan penjualan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp NIHIL. Barang-barang tersebut telah dijual dengan nilai buku Rp NIHIL (nilai perolehan – nilai penyusutan). Penerimaan kas pada SKPD atas penjualan tersebut sebesar Rp NIHIL (hasil penjualan langsung disetor ke Kas Daerah). Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp NIHIL.

b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar Rp NIHIL

c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp NIHIL

2. Defisit Non Operasional

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	
1	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	NIHIL
2	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	NIHIL
3	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	NIHIL
	Jumlah	NIHIL
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	
1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	NIHIL
2	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	NIHIL

No	Uraian	Jumlah (Rp)
3	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	NIHIL
4	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO	NIHIL
5	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	NIHIL
6	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	NIHIL
	Jumlah	NIHIL
	Total	NIHIL

Penjelasan :

a. Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO

Pada tahun 2023 dilaksanakan penjualan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp NIHIL. Barang-barang tersebut telah dijual dengan nilai buku Rp NIHIL (nilai perolehan – nilai penyusutan). Penerimaan kas pada OPD atas penjualan tersebut sebesar Rp 0,00 karena hasil penjualan langsung disetor ke Kas Daerah. Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp NIHIL.

b. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar Rp NIHIL

c. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp NIHIL

3.2.4. Pos Luar Biasa

Pendapatan dari Pos Luar Biasa sebesar NIHIL dan Beban dari Pos Luar Biasa sebesar NIHIL.

3.3 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022. Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp88.266.282.163,21 berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.880.097.407,12, ditambah Surplus-LO TA 2023 sebesar minus **Rp (5.812.090.021,07)** ditambah Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp47,582,402.00, dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar **Rp 9.995.666.561,00**.

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesahan Mendasar sebagai berikut :

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Koreksi Nilai Persediaan	NIHIL	NIHIL
Selisih Revaluasi Aset Tetap	NIHIL	NIHIL
Koreksi Ekuitas Lainnya	47,582,402.00	15,272,650,633.00
Jumlah	47,582,402.00	15,272,650,633.00

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp merupakan selisih dari penambahan dan pengurangan koreksi ekuitas lainnya (Rp - Rp) sesuai jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penambahan Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2023 (Rp)
Serah Terima Kas Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	NIHIL
Serah Terima Piutang/Beban Dibayar Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	NIHIL
Serah Terima Persediaan Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	NIHIL
Serah Terima Aset Tetap Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	NIHIL
Serah Terima Aset Lainnya Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	NIHIL
Serah Terima Kewajiban/Utang/Pendapatan Diterima Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	NIHIL
Koreksi saldo awal Aset tetap (mutasi masuk antar SKPD tahun-tahun sebelumnya) - KOR+MM	NIHIL
Koreksi saldo awal (inventarisasi barang belum tercatat/berlebih) - KOR+LBH	NIHIL
Koreksi saldo awal Aset tetap (hibah masuk tahun-tahun sebelumnya) - KOR+HBM	NIHIL
Koreksi saldo awal Aset tetap (atribusi nilai sertifikat tanah tahun-tahun sebelumnya) - KOR+SER	NIHIL
Koreksi saldo awal Aset tetap (hilang pencatatan) - KOR+HCTT	NIHIL
Koreksi saldo awal Aset tetap (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi) - KOR+/-TKAP	NIHIL
Koreksi saldo awal Aset tetap (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi) - KOR+NKAP	NIHIL
Koreksi saldo awal (pencatatan penilaian barang hasil inventarisasi) - KOR+NILAI	NIHIL
Koreksi saldo awal tambah (reklasifikasi aset tetap penyesuaian kode permendagri 108)	NIHIL
Pencatatan mutasi masuk aset tetap dari OPD - MM	61,909,000.00
Penyesuaian akumulasi penyusutan mutasi keluar aset tetap	NIHIL
Mutasi Masuk Barang Rusak Berat antar SKPD	NIHIL
Koreksi saldo awal Utang Jangka Pendek Lainnya karena	NIHIL
Koreksi saldo persediaan awal	NIHIL
Mutasi masuk barang persediaan dari SKPD/Unit ...	NIHIL
Koreksi saldo awal kas	NIHIL
Koreksi Saldo Awal Utang Lebih Bayar DBH Pusat	NIHIL
koreksi saldo awal salah pencatatan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD Lembaga Keuangan	NIHIL
Koreksi saldo awal TGR yang tercatat di aset lainnya	NIHIL
Koreksi kurang saldo awal AKP	4
Jumlah	61,909,004.00

2. Pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2023 (Rp)
Serah Terima Kas Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	NIHIL
Serah Terima Piutang/Beban Dibayar Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	NIHIL
Serah Terima Persediaan Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	NIHIL
Serah Terima Aset Tetap Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	NIHIL
Serah Terima Aset Lainnya Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	NIHIL
Serah Terima Kewajiban/Utang/Pendapatan Diterima Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	NIHIL
Koreksi saldo awal Aset tetap (penghapusan tahun-tahun sebelumnya) - KOR-HPS	NIHIL
Koreksi saldo awal Aset tetap (mutasi keluar antar SKPD tahun-tahun sebelumnya) - KOR-MUT	NIHIL
Koreksi saldo awal Aset tetap (perubahan batas nilai kapitalisasi) - KOR-NKAP	NIHIL
Koreksi saldo awal kurang (pemeliharaan tahun-tahun sebelumnya) - KOR-PEMEL	NIHIL
Koreksi saldo awal Aset tetap (dobel pencatatan) - KOR-DOB	NIHIL
Koreksi saldo awal Aset tetap (seharusnya merupakan barang habis pakai tahun-tahun sebelumnya) - KOR-BHP	NIHIL
Koreksi saldo awal Aset tetap (hibah keluar tahun-tahun sebelumnya) - KOR-HB	NIHIL
Koreksi saldo awal kurang (reklasifikasi aset tetap penyesuaian kode permendagri 108)	NIHIL
Koreksi saldo awal kurang (pengurangan nilai KDP)	NIHIL
Pencatatan mutasi keluar aset tetap ke OPD - MUT	NIHIL
Penghapusan barang Baik (B)/Rusak Ringan (RR) - HPS	NIHIL
Koreksi saldo akumulasi penyusutan awal Aset tetap	NIHIL

Penyesuaian akumulasi penyusutan mutasi masuk aset tetap	14,326,600.00
Koreksi saldo awal aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD) karena	NIHIL
Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Barang RB/TD	NIHIL
Koreksi saldo awal Akumulasi Amortisasi ATB	NIHIL
Mutasi Keluar Barang Rusak Berat antar SKPD	NIHIL
Penghapusan Aset Lain-Lain - Aset Tidak Berwujud Software	NIHIL
Koreksi saldo awal utang belanja karena	NIHIL
Mutasi keluar barang persediaan ke SKPD/Unit	NIHIL
Koreksi saldo awal beban dibayar di muka	NIHIL
Penyesuaian/koreksi saldo awal Pendapatan diterima di muka	NIHIL
Koreksi Saldo Awal Piutang DBH Pajak Pusat karena salah catat	NIHIL
Penghapusan piutang	NIHIL
Koreksi tambah saldo awal AKP	2
Jumlah	14,326,602.00

3.4 PENJELASAN POS-POS NERACA

3.4.1 ASET

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Th. 2023	Th. 2022
ASET		
1. Aset Lancar	12,147,708.53	61,981,254.40
2. Aset Tetap	92,842,528,522.00	88,524,166,724.00
3. Aset Lainnya	43,655,000.00	43,655,000.00
Jumlah Aset	92,898,331,230.53	88,629,802,978.40
KEWAJIBAN & EKUITAS		
1. Kewajiban	400,890,125.39	363,520,815.19
2. Ekuitas	92,497,441,105.14	88,266,282,163.21
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	92,898,331,230.53	88,629,802,978.40

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Th. 2023	Th. 2022
Kas		
Piutang	1,528,106,549.00	1,531,591,549.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(1,528,106,549.00)	(1,531,591,549.00)
Persediaan	12,147,708.53	61,981,254.40
Beban Dibayar Dimuka	NIHIL	NIHIL
Jumlah Aset Lancar	12,147,708.53	61,981,254.40

A. KAS

Saldo kas terdiri atas Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di JKN dan Kas Lainnya dengan rincian sesuai tabel berikut:

Uraian	Th. 2023	Th. 2022
KAS		
Kas di Kas Daerah	NIHIL	NIHIL
Kas di Bendahara Penerimaan	NIHIL	NIHIL
Kas di Bendahara Pengeluaran	NIHIL	NIHIL
Kas di BLUD	NIHIL	NIHIL
Kas Dana BOS	NIHIL	NIHIL
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	NIHIL	NIHIL
Kas Lainnya	NIHIL	NIHIL
Setara Kas	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp NIHIL dan Saldo Kas tahun 2022 sebesar Rp NIHIL terdiri atas :

- 1) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai/kas di rekening giro yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp NIHIL Kas tersebut merupakan :
 - a) NIHIL
 - b) NIHIL
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebesar Rp NIHIL, Kas tersebut merupakan :
 - a) NIHIL
 - b) NIHIL
- 3) Kas BLUD Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas dan setara kas yang digunakan untuk pengelolaan penerimaan pendapatan dan biaya yang berasal dari hasil operasional BLUD, sebesar Rp

Rinci Kas di BLUD Puskesmas adalah sebagai berikut :

-	BLUD Puskesmas NIHIL Puskesmas NIHIL	:	Rp NIHIL
-	BLUD Puskesmas NIHIL Puskesmas NIHIL	:	Rp NIHIL
-	BLUD Puskesmas NIHIL Puskesmas NIHIL	:	Rp NIHIL
-	BLUD Puskesmas NIHIL Puskesmas NIHIL	:	Rp NIHIL
-	BLUD Puskesmas NIHIL Puskesmas NIHIL	:	Rp NIHIL
	Jumlah		Rp NIHIL

- 4) Kas di Bendahara BOS merupakan Kas BOS sebesar Rp NIHIL merupakan Dana BOS yang berada pada masing-masing sekolah di lingkungan Kabupaten Brebes. Dengan rincian sebagai berikut :

- SD : Rp NIHIL pada NIHIL. SD Negeri
 - SMP : Rp NIHIL pada NIHIL SMP Negeri
- 5) Kas Lainnya, merupakan Kas NIHIL.

B. PIUTANG

Saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp NIHIL dengan rincian dijelaskan sesuai lampiran :

Jenis Piutang	Th. 2023	Th. 2022
Piutang Pendapatan :		
Piutang Pajak Daerah	NIHIL	NIHIL
Piutang Retribusi Daerah	NIHIL	NIHIL
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	NIHIL	NIHIL
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	NIHIL	NIHIL
Piutang Transfer Antar Daerah	NIHIL	NIHIL
Piutang Lainnya :		
Piutang Lainnya	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL

1) Piutang Pendapatan

a) Piutang Pajak Daerah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan pajak daerah, sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum diterima, Saldo Piutang Pajak Daerah sebesar Rp NIHIL dengan rincian sesuai tabel berikut :

Piutang Pajak :	Th. 2023	Th. 2022
Piutang Pajak Hotel	NIHIL	NIHIL
Piutang Pajak Restoran	NIHIL	NIHIL
Piutang Pajak Hiburan	NIHIL	NIHIL
Piutang Pajak Reklame	NIHIL	NIHIL
Piutang Pajak Penerangan Jalan	NIHIL	NIHIL
Piutang Pajak Parkir	NIHIL	NIHIL
Piutang Pajak Air Tanah	NIHIL	NIHIL
Piutang Pajak Sarang Burung Walet	NIHIL	NIHIL
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	NIHIL	NIHIL
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	NIHIL	NIHIL
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	NIHIL	NIHIL
Piutang Pajak Lingkungan	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Mutasi Piutang Pajak dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo awal Piutang Pajak	NIHIL

Uraian	Nilai (Rp)
Penambahan :	NIHIL
a. Penambahan piutang baru	NIHIL
b. Koreksi tambah/salah catat saldo piutang tahun lalu	NIHIL
c. dst	NIHIL
Pengurangan :	
a. Setoran piutang tahun berjalan	NIHIL
b. Koreksi kurang/salah catat saldo tahun lalu	NIHIL
c..... dst	NIHIL
Saldo Akhir Piutang Pajak	NIHIL

Rincian Mutasi Piutang Pajak dijelaskan sebagai berikut :

Uraian Penambahan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Penambahan piutang transaksi 2023		
a. Piutang pajak	NIHIL	NIHIL
b. Piutang pajak	NIHIL	NIHIL
c. Piutang pajak	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Uraian Penambahan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Koreksi tambah/salah catat saldo piutang tahun lalu		
a. Piutang pajak	NIHIL	NIHIL
b. Piutang pajak	NIHIL	NIHIL
c. Piutang pajak	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Uraian Pengurangan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Setoran piutang tahun berjalan		
a. Piutang pajak	NIHIL	NIHIL
b. Piutang pajak	NIHIL	NIHIL
c. Piutang pajak	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Uraian Pengurangan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Koreksi kurang/salah catat saldo tahun lalu		
a. Piutang pajak	NIHIL	NIHIL
b. Piutang pajak	NIHIL	NIHIL
c. Piutang pajak	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL

b) Piutang Retribusi Daerah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum diterima, Saldo Rekening Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp dengan rincian sesuai tabel berikut :

Piutang Retribusi Daerah :	Th. 2023	Th. 2022
Piutang Retribusi Jasa Umum	NIHIL	NIHIL
Piutang Retribusi Jasa Usaha	NIHIL	NIHIL
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Mutasi Piutang Retribusi dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo awal Piutang Retribusi	NIHIL
Penambahan :	NIHIL
a. Penambahan piutang baru	NIHIL
b. Koreksi tambah/salah catat saldo piutang tahun lalu	NIHIL
c. dst	NIHIL
Pengurangan :	NIHIL
a. Setoran piutang tahun berjalan	NIHIL
b. Koreksi kurang/salah catat saldo tahun lalu	NIHIL
c..... dst	NIHIL
Saldo Akhir Piutang Retribusi	NIHIL

Rincian Mutasi Piutang Retribusi dijelaskan sebagai berikut :

Uraian Penambahan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Penambahan piutang baru		
a. Piutang retribusi	NIHIL	NIHIL
b. Piutang retribusi	NIHIL	NIHIL
c. Piutang retribusi	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Uraian Penambahan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Koreksi tambah/salah catat saldo piutang tahun lalu		
a. Piutang retribusi	NIHIL	NIHIL
b. Piutang retribusi	NIHIL	NIHIL
c. Piutang retribusi	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Uraian Pengurangan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Setoran piutang tahun berjalan		
a. Piutang retribusi	NIHIL	NIHIL
b. Piutang retribusi	NIHIL	NIHIL
c. Piutang retribusi	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Uraian Pengurangan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Koreksi kurang/salah catat saldo tahun lalu		
a. Piutang retribusi	NIHIL	NIHIL
b. Piutang retribusi	NIHIL	NIHIL
c. Piutang retribusi	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL

c) Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum diterima. Saldo piutang dimaksud adalah Rp NIHIL. Rincian Piutang tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :	Th. 2023	Th. 2022
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	NIHIL	NIHIL
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	NIHIL	NIHIL
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL

d) Piutang Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Th. 2023	Th. 2022
Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	NIHIL	NIHIL
Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	NIHIL	NIHIL
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	NIHIL	NIHIL
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	NIHIL	NIHIL
Piutang Jasa Giro	NIHIL	NIHIL
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1,376,127,599.00	
Piutang Pendapatan Bunga	NIHIL	NIHIL
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	NIHIL	NIHIL

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Th. 2023	Th. 2022
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	NIHIL	NIHIL
Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing	NIHIL	NIHIL
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	NIHIL	NIHIL
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	NIHIL	NIHIL
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	NIHIL	NIHIL
Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	NIHIL	NIHIL
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	NIHIL	NIHIL
Piutang Pendapatan BLUD	NIHIL	NIHIL
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	NIHIL	NIHIL
Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	NIHIL	NIHIL
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	151,978,950.00	
Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	NIHIL	NIHIL
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	NIHIL	NIHIL
Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	NIHIL	NIHIL
Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan	NIHIL	NIHIL
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	NIHIL	NIHIL
Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	NIHIL	NIHIL
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	NIHIL	NIHIL
Jumlah	1,528,106,549.00	

Penjelasan :

- a. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan piutang pokok dana bergulir yang dikelola SKPD berupa pinjaman modal dana/peralatan mesin kepada pihak ke-3 tahun sebesar Rp
- b. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan piutang atas kehilangan barang milik daerah berupa sesuai SKTJM/SK pembebanan a.n sebesar Rp..... Pengurangan dari saldo 2022 merupakan setoran dan penambahan saldo 2023 merupakan penetapan kerugian daerah baru a.n dengan SKTJM.
- c. Piutang Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan piutang denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik oleh penyedia jasa dan belum diterima sampai dengan akhir periode akuntansi. Daftar Piutang Keterlambatan Pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nama Pihak Ke-3	Nilai (Rp)
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

- d. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp merupakan piutang kepada wajib pajak atas denda keterlambatan pembayaran pajak. Rinciannya dijelaskan pada tabel berikut :

No	Uraian	Tahun Pajak	Nilai (Rp)
1	Pajak	NIHIL	NIHIL
2	Pajak	NIHIL	NIHIL
3	Pajak	NIHIL	NIHIL
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

- e. Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp..... merupakan piutang kepada wajib retribusi atas denda keterlambatan pembayaran retribusi. Rinciannya dijelaskan pada tabel berikut :

No	Uraian	Tahun Retribusi	Nilai (Rp)
1	Retribusi	NIHIL	NIHIL
2	Retribusi	NIHIL	NIHIL
3	Retribusi	NIHIL	NIHIL
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

- f. Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp..... merupakan Piutang Jaminan atas pekerjaan tahun pekerjaan oleh penyedia jasa a.n
- g. Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp merupakan piutang atas kelebihan pembayaran belanja kepada yang belum dikembalikan kepada Pemkab Brebes.
- h. Piutang Pendapatan BLUD
Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan daerah dari aktivitas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum diterima. Saldo piutang dimaksud per tanggal tersebut adalah Rp..... Rincian Piutang BLUD adalah sebagai berikut :

Uraian	2023	2022
1. BLUD	NIHIL	NIHIL
Piutang BPJS	NIHIL	NIHIL
Piutang	NIHIL	NIHIL
Piutang	NIHIL	NIHIL
Jumlah 1	NIHIL	NIHIL
2. BLUD	NIHIL	NIHIL
Piutang BPJS	NIHIL	NIHIL
Piutang	NIHIL	NIHIL
Piutang	NIHIL	NIHIL

Uraian	2023	2022
Jumlah 2	NIHIL	NIHIL
Total	NIHIL	NIHIL

(uraian/nama BLUD boleh ditambah)

- i. Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp merupakan piutang kepada atas keterlambatan pembayaran pemanfaatan BMD
- j. Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan piutang jasa dana bergulir yang dikelola SKPD berupa pinjaman modal dana/peralatan mesin kepada pihak ke-3 tahun sebesar Rp.....
- k. Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan piutang jasa dana bergulir yang dikelola SKPD berupa pinjaman modal dana/peralatan mesin kepada pihak ke-3 tahun sebesar Rp.....
- l. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp..... merupakan piutang pemanfaatan BMD yang belum diterima pembayarannya per 31 Desember 2023. Rinciannya dijelaskan sesuai tabel berikut :

No	Uraian	Nama Pihak Ke-3	Nilai (Rp)
1	Piutang pemanfaatan tanah	NIHIL	NIHIL
2	Piutang pemanfaatan bangunan	NIHIL	NIHIL
3	Dst ...	NIHIL	NIHIL
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

e) Piutang Transfer

Piutang Transfer sebesar Rp dirinci sebagai berikut :

Piutang Transfer :	Th. 2023	Th. 2022
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	NIHIL	NIHIL
Piutang Transfer Antar Daerah	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Rincian Piutang Transfer dijelaskan sesuai tabel berikut :

1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Th. 2023	Th. 2022
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	NIHIL	NIHIL
Piutang Dana Perimbangan	NIHIL	NIHIL
Piutang Dana Insentif Daerah (DID)	NIHIL	NIHIL
Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur	NIHIL	NIHIL

Piutang Dana Keistimewaan	NIHIL	NIHIL
Piutang Dana Desa	NIHIL	NIHIL
Piutang Transfer Dana Penyesuaian	NIHIL	NIHIL
Piutang Transfer Lainnya	NIHIL	NIHIL
Piutang Pendapatan Lainnya	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL

2. Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah

Uraian	Th. 2023	Th. 2022
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Bagi Hasil	NIHIL	NIHIL
Piutang Bantuan Keuangan	NIHIL	NIHIL
Piutang Pendapatan Hibah	NIHIL	NIHIL
Piutang Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	NIHIL	NIHIL
Piutang Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana	NIHIL	NIHIL
Piutang Pendapatan Hibah Dana BOS	NIHIL	NIHIL
Piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Penjelasan :

- a. Piutang Bagi Hasil sebesar Rp dengan rincian :
 - 1) Piutang
 - 2) Piutang
 - 3) Piutang
- b. Piutang Bantuan Keuangan sebesar Rp dengan rincian :
 - 1) Piutang
 - 2) Piutang
 - 3) Piutang

4) Piutang Lainnya

Rincian Piutang Lainnya dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian	Th. 2023	Th. 2022
Piutang Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	NIHIL	NIHIL
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	NIHIL	NIHIL
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	NIHIL	NIHIL
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	NIHIL	NIHIL
Uang Muka	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Penjelasan :

- a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang sebesar NIHIL
- b. Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang sebesar NIHIL
- c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar NIHIL
- d. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp
Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas Putang TP-TGR yang akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Bagian Lancar ini merupakan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian yang telah ditetapkan dengan SKTJM atau Keputusan Pembebanan. Rincian Bagian Lancar TP-TGR dijelaskan sesuai tabel berikut :

Nama Bendahara/Pihak Yang Merugikan	Th. 2023	Th. 2022
	NIHIL	NIHIL
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Pengurangan dari saldo 2022 merupakan setoran dan penambahan saldo 2023 merupakan penetapan kerugian daerah baru a.n dengan SKTJM.

- f) Uang Muka sebesar NIHIL

C. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dirinci sesuai penjelasan berikut :

- 1) Penyisihan Piutang Pendapatan

Jenis Piutang	Th. 2023	Th. 2022
Penyisihan Piutang Pendapatan	NIHIL	NIHIL
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	NIHIL	NIHIL
Penyisihan Piutang Retribusi	NIHIL	NIHIL
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	NIHIL	NIHIL
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(1,528,106,549.00)	
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	NIHIL	NIHIL
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	NIHIL	NIHIL
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	NIHIL	NIHIL
Jumlah	(1,528,106,549.00)	

- 2) Penyisihan Piutang Lainnya

Jenis Piutang	Th. 2023	Th. 2022
Penyisihan Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	NIHIL	NIHIL

Obat-obatan	NIHIL	NIHIL
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	NIHIL	NIHIL
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga	NIHIL	NIHIL
Natura dan Pakan	NIHIL	NIHIL
Persediaan Penelitian	NIHIL	NIHIL
Persediaan Dalam Proses	NIHIL	NIHIL
Persediaan Barang BOS	NIHIL	NIHIL
Jumlah	12,147,708.53	61,981,254.40

Penambahan dan pengurangan selama tahun 2023 dijelaskan pada tabel berikut :

Persediaan :	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023
Bahan		122,801,330.00	122,801,330.00	-
Suku Cadang				-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	61,981,254.40	485,101,660.00	534,935,205.87	12,147,708.53
Obat-obatan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Natura dan Pakan		156,824,000.00	156,824,000.00	-
Persediaan Penelitian	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Persediaan Dalam Proses	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Persediaan Barang BOS	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	61,981,254.40	764,726,990.00	814,560,535.87	12,147,708.53

Mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2023 secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
SALDO AWAL	61,981,254
Koreksi (+) Saldo Awal	NIHIL
Pengadaan / Pembelian	764,726,990.00
Reklas Dari Belanja Tdk Terduga	NIHIL
Reklas Dari B. Modal	NIHIL
Reklas Dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	NIHIL
Reklas Dari B. Pegawai	NIHIL
Reklas Dari B. Jasa	NIHIL
Reklas Dari Pemeliharaan	NIHIL
Mutasi / Transfer Masuk	NIHIL
Hibah Masuk	NIHIL
Hutang Persediaan	NIHIL
Reklas Antar Beban Persediaan (+)	NIHIL
Jumlah Penambahan	764,726,990.00
Koreksi (-) Saldo Awal	NIHIL
Pemakaian	794,125,309.87
Mutasi Keluar	NIHIL
Hibah Keluar	NIHIL
Reklas Ke Aset Tetap	NIHIL
Reklas Ke Ekstrakomtabel	NIHIL
Reklas Ke Belanja Pegawai	NIHIL

Uraian	Nilai (Rp)
Reklas Ke Belanja Jasa	NIHIL
Reklas Ke Belanja Pemeliharaan	NIHIL
Pindah Ke Kadaluarsa/-Rusak	20,435,226.00
Reklas Antar Beban Persediaan (-)	NIHIL
Jumlah Pengurangan	814,560,535.87
SALDO AKHIR PERSEDIAAN	12,147,708.53

Saldo persediaan tidak termasuk di dalamnya persediaan yang telah kadaluarsa dan rusak. Mutasi barang kadaluarsa dan rusak selama tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Persediaan Kadaluarsa/Usang/Rusak	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023
Bahan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Suku Cadang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Obat-obatan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Natura dan Pakan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Persediaan Penelitian	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Persediaan Dalam Proses	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penambahan sebesar Rp terdiri dari :

- a. Barang persediaan yang semula merupakan barang aktif namun pada tahun 2023 telah dinyatakan kadaluarsa/using/rusak disahkan dengan berita acara nomor sebesar Rp.
- b. Penambahan barang kadaluarsa/using/rusak karena koreksi pencatatan sebesar Rp

Pengurangan sebesar Rp terdiri dari :

- a. Penghapusan barang kadaluarsa/using/rusak sebesar Rp
- b. Pengurangan karena koreksi pencatatan sebesar Rp

F. INVESTASI JANGKA PANJANG

Terdiri dari :

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar NIHIL
- b. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada perusahaan daerah. Nilai ini berasal dari penambahan nilai penyertaan modal selama tahun 2023 dengan perhitungan metode ekuitas dan metode biaya.

Saldo PMPD masing-masing perusahaan daerah adalah sebagai berikut :

No.	Perusahaan Daerah	Saldo Th. 2023	Saldo Th. 2022
	PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK :		
1	BPD Bank Jateng	NIHIL	NIHIL
2	BKK Jateng	NIHIL	NIHIL
3	PD. BPR BKK Banjarharjo	NIHIL	NIHIL
4	PD BPR Bank Brebes (Bank Puskpakencana)	NIHIL	NIHIL
	PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH :	NIHIL	NIHIL
1	PDAM Tirta Baribis	NIHIL	NIHIL
2	Perusda Perbengkelan	NIHIL	NIHIL
3	Perusda Percetakan	NIHIL	NIHIL
4	Perusda Farmasi Dan Sarana Kesehatan	NIHIL	NIHIL
5	PRPP Jawa Tengah - Semarang	NIHIL	NIHIL
	JUMLAH	NIHIL	NIHIL

Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal tahun 2023 dijelaskan dalam tabel berikut :

No.	Perusahaan Daerah	Modal Saham Pemkab Brebes Th. 2022	Penyertaan Modal 2023	Modal Saham Pemkab Brebes Th. 2023
	PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK :			
1	BPD Bank Jateng	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	BKK Jateng	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	PD. BPR BKK Banjarharjo	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	PD BPR Bank Brebes (Bank Puskpakencana)	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH :			
1	PDAM Tirta Baribis	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Perusda Perbengkelan	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Perusda Percetakan	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Perusda Farmasi Dan Sarana Kesehatan	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	PRPP Jawa Tengah - Semarang	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Investasi Jangka Panjang Permanen sesuai metode pencatatannya dijelaskan sebagai berikut :

1) Metode Ekuitas

Perhitungannya dijelaskan pada tabel berikut :

No.	Perusahaan Daerah	Saldo PMPD th. 2023	Total Ekuitas	% Kepemilikan Daerah	Saldo PMPD th 2023
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
	PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK :				
1	PD. BPR BKK Banjarharjo	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	PD BPR Bank Brebes (Bank Puskpakencana)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH :				
1	PDAM Tirta Baribis	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2	Perusda Perbengkelan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Perusda Percetakan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Perusda Farmasi Dan Sarana Kesehatan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	J u m l a h	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2) Metode Biaya

Perhitungannya dijelaskan pada tabel berikut :

No.	Perusahaan Daerah	Saldo PMPD Th. 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo PMPD Th. 2023
1	BPD Bank Jateng	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	BKK Jateng	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	PRPP Jawa Tengah - Semarang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	J u m l a h	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

G. ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN

1. Aset Tetap

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Brebes berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang digunakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes per 31 Desember 2023 dan 2022. Perolehan aset tetap berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang didalamnya termasuk pengadaan aset tetap dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau perolehan lainnya yang sah. Belanja yang tidak dikapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi adalah Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK, penggandaan dan sejenisnya.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp110,455,208,801.00 dan Rp116,600,719,585.00 dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tetap :	Th. 2023	Th. 2022
a. Tanah	23,530,802,140.00	23,530,802,140.00
b. Peralatan dan Mesin	12,215,237,642.00	12,227,605,142.00
c. Gedung dan Bangunan	73,191,018,019.00	79,522,700,303.00
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	34,920,000.00	34,920,000.00
e. Aset Tetap Lainnya	411,335,000.00	411,335,000.00
f. Konstruksi dalam Pekerjaan	1,071,896,000.00	873,357,000.00
g. Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap	110,455,208,801.00	116,600,719,585.00

Mutasi aset tetap tahun 2023 sebagai berikut :

URAIAN JENIS	SALDO 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 2023
a. Tanah	23,530,802,140.00			23,530,802,140.00
b. Peralatan dan Mesin	12,215,237,642.00	90,209,000.00	77,841,500.00	12,227,605,142.00
c. Gedung dan Bangunan	73,191,018,019.00	6,331,682,284.00	-	79,522,700,303.00
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	34,920,000.00	-	-	34,920,000.00
e. Aset Tetap Lainnya	411,335,000.00	-	-	411,335,000.00
f. Konstruksi dalam Pekerjaan	1,071,896,000.00	-	198,539,000.00	873,357,000.00
JUMLAH	110,455,208,801.00	6,421,891,284.00	276,380,500.00	116,600,719,585.00

1) Rincian **mutasi penambahan** aset tahun 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

N O	URAIAN	JUMLAH
	Penambahan :	576,702,000.00
1	Belanja Modal	NIHIL
2	Reklas Dari B. Pegawai	NIHIL
3	Reklas Dari B. Jasa	49,668,000.00
4	Reklas Dari B. Persediaan	NIHIL
5	Reklas Dari B. Pemeliharaan	NIHIL
6	Reklas Dari Persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ke-3	NIHIL
7	Hibah Masuk (Pemerintah Pusat)	5,535,073,284.00
8	Hibah Masuk (Pemerintah Provinsi)	NIHIL
9	Hibah Masuk (Pihak Ke-3)	NIHIL
10	Hibah Masuk (Komite Sekolah)	NIHIL
11	Mutasi Masuk	61,909,000.00
12	Hutang Aset	NIHIL
13	Reklas Dari Aset Lainnya (Rusak Berat)	NIHIL
14	Reklas Dari Aset Lainnya (Detail Engineering)	NIHIL
15	Reklas Aset Tetap Dari KDP	198,539,000.00
16	Koreksi Tambah (Mutasi Masuk Tahun Sebelumnya)	NIHIL
17	Koreksi Tambah (Inventarisasi Barang Belum Tercatat/Berlebih)	NIHIL
18	Koreksi Tambah (Hibah Masuk Tahun Sebelumnya)	NIHIL
19	Koreksi Tambah (Atribusi Nilai Sertifikat Tanah Tahun Sebelumnya)	NIHIL
20	Koreksi Tambah (Hilang Pencatatan)	NIHIL
21	Koreksi Tambah (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi)	NIHIL
22	Koreksi Tambah (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi)	NIHIL
23	Koreksi Tambah (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap)	NIHIL
24	Koreksi Tambah (Penilaian Aset Tetap)	NIHIL
25	Koreksi Tambah (Reklasifikasi Detail Engineering Ke Aset Tetapnya Tahun Sebelumnya)	NIHIL
26	Koreksi Tambah (.....)	NIHIL
	Jumlah Penambahan	6,421,891,284.00

Penjelasan :

- Hibah masuk dari Pemerintah Pusat berupa senilai Rp
- Hibah masuk dari Pemerintah Provinsi berupa senilai Rp
- Hibah masuk dari Pemerintah Pihak ke-3 berupa senilai Rp
- Hutang Aset berupa..... senilai Rp yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum dibayar.
- Koreksi hibah masuk tahun sebelumnya berupa Hibah dari

senilai Rp .

- f) Koreksi tambah berupa senilai Rp .
g) Dst...

- 2) Rincian **mutasi pengurangan** aset tahun 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

N O	URAIAN	JUMLAH
	Pengurangan :	
1	Extrakomtable	NIHIL
2	Reklas Ke B. Persediaan	NIHIL
3	Reklas Ke B. Pemeliharaan	NIHIL
4	Reklas Ke B. Perjalanan Dinas	NIHIL
5	Reklas Ke B. Pegawai	NIHIL
6	Reklas Ke B. Jasa	NIHIL
7	Belanja Modal Untuk Pembayaran Hutang	NIHIL
8	Hibah Keluar	NIHIL
9	Mutasi Keluar	NIHIL
10	Reklas Dari KDP Ke Aset Tetap	198,539,000.00
11	Rusak Berat (RB)	NIHIL
12	Tidak Ditemukan (TD)	NIHIL
13	Penghapusan Barang B/RR	77,841,500.00
14	Reklas Ke Aset Tidak Berwujud (ATB)	NIHIL
15	Koreksi Kurang (Penghapusan Tahun Sebelumnya)	NIHIL
16	Koreksi Kurang (Mutasi Keluar Antar Opd Tahun Sebelumnya)	NIHIL
17	Koreksi Kurang (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi)	NIHIL
18	Koreksi Kurang (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi)	NIHIL
19	Koreksi Kurang (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap)	NIHIL
20	Koreksi Kurang (Pemeliharaan Tahun Sebelumnya)	NIHIL
21	Koreksi Kurang (Dobel Pencatatan)	NIHIL
22	Koreksi Kurang (BHP Tahun Sebelumnya)	NIHIL
23	Koreksi Kurang (Hibah Keluar Tahun Sebelumnya)	NIHIL
24	Koreksi Kurang (.....)	NIHIL
	Jumlah Pengurangan	276,380,500.00

Penjelasan :

- a) Hibah keluar dari Pemerintah Pusat berupa senilai Rp .
b) Hibah keluar dari Pemerintah Provinsi berupa senilai Rp .
c) Hibah keluar dari Pemerintah Pihak ke-3 berupa senilai Rp .
d) Koreksi hibah keluar tahun sebelumnya berupa Hibah dari
senilai Rp .
e) Koreksi kurang berupa senilai Rp .
f) Dst...

- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp dan Rp . Adapun rincian Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Nama Rekana n	Nomor Kontrak	Nilai Kontra k (Rp)	Kemajua n Fisik (%)	Nominal KDP (Rp)	Nominal Terhutan g (Rp)
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------------

Pembuatan DED Pasar Kersana		050/0352.b/2022			99,352,000	
Pembuatan DED Pasar Winduaji		050/0354.b/2022			99,187,000	
<i>Pekerjaan</i>						
Jumlah					198,539,000.00	-

Penjelasan :

- Pekerjaan tersebut bersumber dana dari dan dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan hari. Nilai kontrak sebesar Rp , nilai KDP tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp , dan nilai terhutang sebesar Rp
- Pekerjaan tersebut bersumber dana dari dan dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan hari. Nilai kontrak sebesar Rp , nilai KDP tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp , dan nilai terhutang sebesar Rp
- Pekerjaan tersebut bersumber dana dari dan dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan hari. Nilai kontrak sebesar Rp , nilai KDP tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp , dan nilai terhutang sebesar Rp

Mutasi Penambahan/Pengurangan KDP tahun 2023 dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian Pekerjaan	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023	Ket
<i>Pekerjaan</i>					<i>(contoh) Fisik telah selesai</i>
<i>Pekerjaan</i>					<i>(contoh) Penghapusan</i>
<i>Pekerjaan</i>					
<i>Pekerjaan</i>					
JUMLAH					

2. Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2023 tidak termasuk penyusutan atas aset tetap yang telah diusulkan penghapusannya dan telah dipindahbukukan ke kelompok Aset Lainnya akun Aset Lain-lain.

Mutasi Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	11,620,141,864.00	423,400,458.00	77,841,500.00	11,965,700,822.00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	11,925,605,199.00	1,480,717,032.00	1.00	13,406,322,230.00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	14,841,000.00	873,000.00	-	15,714,000.00 197,603,000.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	197,603,000.00	873,000.00	-	15,714,000.00

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
Jumlah	23,758,191,063.00	1,904,990,490.00	77,841,501.00	25,585,340,052.00

Penambahan akumulasi penyusutan selama tahun 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Beban Penyusutan	Hibah Masuk	Mutasi Masuk	Koreksi Tambah	Jumlah Penambahan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	409,073,858.00		14,326,600.00		423,400,458.00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,480,717,030.00			2.00	1,480,717,032.00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	873,000.00				873,000.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	1,890,663,888.00	-	14,326,600.00	2.00	1,904,990,490.00

Pengurangan akumulasi penyusutan selama tahun 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Penghapusan	Mutasi Keluar	Koreksi Kurang	Jumlah Pengurangan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	77,841,500.00			77,841,500.00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan			1.00	1.00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	77,841,500.00	-	1.00	77,841,501.00

H. DANA CADANGAN

Saldo Dana Cadangan Tahun 2023 sebesar NIHIL

I. ASET LAINNYA

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp dan Rp dengan rincian :

ASET LAINNYA	Saldo Th. 2023	Saldo Th. 2022
Tagihan Jangka Panjang	NIHIL	NIHIL
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	NIHIL	NIHIL
Aset Tidak Berwujud	NIHIL	NIHIL
Aset Lain-lain	87,638,000.00	87,638,000.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	NIHIL	NIHIL

ASET LAINNYA	Saldo Th. 2023	Saldo Th. 2022
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	43,983,000.00	43,983,000.00
Jumlah	131,621,000.00	131,621,000.00

1. Tagihan Jangka Panjang tahun 2023 sebesar Rp

2. Aset Tak Berwujud

Aset tersebut merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp . Saldo tersebut berupa software/aplikasi.

Penambahan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :

- a. Pengadaan software/aplikasi sebesar Rp
- b. Koreksi salah catat saldo tahun sebelumnya sebesar Rp
- c. dst ...

Pengurangan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :

- a. Penghapusan software/aplikasi sebesar Rp
- b. Koreksi pengurangan karena salah catat saldo tahun sebelumnya sebesar Rp
- c. dst ...

3. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp. Mutasi terdiri atas :

- a. Saldo awal Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp
- b. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp
- c. Koreksi penambahan Amortisasi Aset Tidak Berwujud salah catat saldo tahun lalu sebesar Rp
- d. Koreksi pengurangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud salah catat saldo tahun lalu sebesar Rp
- e. dst ...

4. Aset Lain-lain Rp terdiri atas :

- a. Aset tetap Rusak Berat (RB)/TD saldo sebesar Rp
- b. Aset tetap yang telah tidak digunakan dalam operasional pemerintah saldo sebesar Rp

Mutasi Aset Lain-lain dijelaskan pada tabel berikut :

Uraian	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023
Aset Tetap Rusak Berat/TD	87,638,000.00			87,638,000.00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah		NIHIL	NIHIL	NIHIL
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	43,983,000.00	-	-	43,983,000.00
Jumlah	131,621,000.00	-	-	131,621,000.00

1) Penambahan Barang RB/TD sebesar Rp

2) Pengurangan barang RB/TD sebesar Rp

- a) Pengurangan karena penghapusan sebesar Rp . Atas barang-barang tersebut yang telah dihapusbukukan dan tidak tercatat pada KIB.

- b) Pengurangan karena koreksi salah catat sebesar Rp .
- c. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah :
- 1) Detail Engineering (DE) yang tercatat pada Aset Lain-lain sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023
DE				
Jumlah				

- a) Penambahan merupakan DE 2023 yang belum direalisasikan pekerjaan fisiknya sebesar Rp
- b) Pengurangan merupakan saldo DE tahun sebelumnya yang telah direklasifikasi ke aset tetap dan telah menambah nilai fisik yang berkenaan sebesar Rp
- c) Pengurangan saldo DE tahun sebelumnya yang telah direklasifikasi ke aset tetap lainnya buku sebesar Rp
- d) Pengurangan Saldo DE tahun sebelumnya yang dihapuskan karena batal digunakan Rp
- 2) Barang Hibah Keluar yang belum dihapuskan sebesar Rp , dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan	Nilai (Rp)
Jumlah				

Mutasi Barang Hibah Keluar yang Belum Dihapuskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023
Barang Hibah Keluar yang Belum Dihapus				
Akumulasi Penyusutan Barang Hibah Keluar yang Belum Dihapus				
Jumlah				

Barang hibah keluar yang belum dihapus merupakan barang yang telah dihibahkan kepada namun sampai dengan akhir tahun 2023 belum dihapuskan.

- 3) Barang berlebih yang belum dinilai sebesar Rp , dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan	Nilai (Rp)
Jumlah				

Mutasi Barang berlebih belum dinilai sebagai berikut :

Uraian Barang	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023
Jumlah				

d. Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat/TD

Uraian	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang	43,983,000.00			43,983,000.00
Jumlah	43,983,000.00	-	-	43,983,000.00

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Barang RB/TD merupakan Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang RB/TD dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penambahan karena pindah kondisi dari Barang Baik (B) ke Rusak Berat (RB) sebesar Rp .
- 2) Penambahan karena koreksi salah catat saldo tahun sebelumnya sebesar Rp .
- 3) Pengurangan karena penghapusan sebesar Rp .
- 4) Pengurangan karena koreksi salah catat saldo tahun sebelumnya sebesar Rp .

3.4.2 Kewajiban

3.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan saldo masing-masing sebesar Rp dan Rp dapat dirinci sebagai berikut :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :	Saldo Th. 2023	Saldo Th. 2022
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Utang Bunga	-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	73,057,621.39	73,057,621.39
Utang Belanja	327,832,504.00	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah	400,890,125.39	73,057,621.39

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo rekening Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp merupakan :

- a. Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran akan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, berupa
 - 1) Pajak.....sebesar Rp
 - 2) Pajak..... sebesar Rp
- b. Potongan Gaji yang belum disetorkan kepada pihak ke-3, berupa :
 - 1) Taspen sebesar Rp
 - 2) Iurang Jaminan Kesehatan sebesar Rp
 - 3) Iurang Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp
 - 4) Iurang Jaminan Kecelakaan Kematian sebesar Rp
 - 5) Taperum sebesar Rp
 - 6) Iuran Wajib Pegawai sebesar Rp
- c. Belanja yang telah direalisasikan namun belum dibayar kepada pihak ke-3 dan kas nya masih berada di rekening Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp
- d. *Dst (d disesuaikan dengan kondisi SKPD)*

2. Utang Bunga

Utang Bunga merupakan reklasifikasi bagian lancar dari bunga pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2023 adalah NIHIL

3. Utang Pinjaman Jangka Pendek

Utang ini per 31 Desember 2023 bersaldo NIHIL

4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi bagian lancar dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran. dengan saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar NIHIL

5. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan kepada pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka

sebesar per 31 Desember 2023 sebesar Rp

Uraian Pendapatan Diterima di Muka	Saldo Th. 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th. 2023
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III				
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III				
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah				
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah		73,057,621.39	73,057,621.39	73,057,621.39
Jumlah		73,057,621.39	73,057,621.39	73,057,621.39

Mutasi pendapatan diterima dimuka tahun 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Uraian Kegiatan :	
Penerimaan pendapatan, diterima pada tanggal untuk jangka waktu	
Saldo Awal	
Penambahan :	
a. Penambahan PDDM	
b. Koreksi tambah salah catat saldo tahun sebelumnya	
Jumlah Penambahan	
Pengurangan :	
a. PDDM tahun sebelumnya yang telah menjadi pendapatan	
b. Koreksi kurang salah catat saldo tahun sebelumnya	
Jumlah Pengurangan	
Saldo Akhir	

6. *Utang Belanja*

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Beban Pegawai dan Beban Barang tahun anggaran sebelumnya namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2022 sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo Th. 2023	Saldo Th. 2022
Utang Belanja Pegawai		
Utang Belanja Barang dan Jasa - Persediaan		
Utang Belanja Barang dan Jasa - Pemeliharaan		
Utang Belanja Barang dan Jasa - Jasa	10,826,318.00	
Utang Belanja Barang dan Jasa - Perjalanan Dinas		
Utang Belanja Bunga		
Utang Belanja Subsidi		
Utang Belanja Hibah		

Uraian	Saldo Th. 2023	Saldo Th. 2022
Utang Belanja Tidak Terduga		
Utang Belanja Bagi Hasil		
Utang Belanja Bantuan Keuangan		
Utang Belanja Bantuan Sosial	61,488,998.00	
Utang Beban Lain-lain	255,517,188.00	
Jumlah	327,832,504.00	-

Utang Belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan :
 - a. Utang Belanja Pegawai merupakan :
 - 1) Utang TPP bulan Desember 2022 sebesar Rp
 - 2) Utang Upah Pungut Pajak/retribusi triwulan IV sebesar Rp
 - 3) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp
 - b. Utang Belanja Barang/Persediaan merupakan:
 - 1) Utang atas pengadaan obat-obatan sebesar Rp
 - 2) Utang atas pengadaan sebesar Rp
 - 3) Utang atas pengadaan natura dan pakan sebesar Rp
 - c. Utang Belanja Pemeliharaan merupakan:
 - 1) Utang atas Pemeliharaansebesar Rp
 - 2) Utang atas Pemeliharaansebesar Rp
 - 3) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp
 - d. Utang Belanja Jasa merupakan :
 - 1) Utang atas belanja Telepon sebesar Rp
 - 2) Utang atas belanja Air sebesar Rp
 - 3) Utang atas belanja Internet sebesar Rp
 - 4) Utang atas belanja Jasa Tenaga BLUD sebesar Rp
 - 5) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp
 - e. Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp
2. Pengurangan :
 - a. Utang Belanja Pegawai merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut :
 - 1) Utang TPP bulan Desember 2022 sebesar Rp
 - 2) Utang Upah Pungut Pajak/retribusi triwulan IV sebesar Rp
 - 3) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp
 - b. Utang Belanja Barang/Persediaan merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut :
 - 1) Utang atas pengadaan obat-obatan sebesar Rp
 - 2) Utang atas pengadaan sebesar Rp
 - 3) Utang atas pengadaan natura dan pakan sebesar Rp
 - c. Utang Belanja Pemeliharaan merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut :
 - 1) Utang atas Pemeliharaansebesar Rp
 - 2) Utang atas Pemeliharaansebesar Rp

- 3) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp
- d. Utang Belanja Jasa merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut:
 - 1) Utang atas belanja Telepon sebesar Rp
 - 2) Utang atas belanja Air sebesar Rp
 - 3) Utang atas belanja Internet sebesar Rp
 - 4) Utang atas belanja Jasa Tenaga BLUD sebesar Rp
 - 5) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp
- e. Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp

7. *Utang Jangka Pendek Lainnya*

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai Utang Belanja namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp dan Rp .

Utang jangka pendek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang saldo tahun lalu sebesar Rp merupakan utang retensi aset tetap yang telah dikoreksi dan telah dihapuskan berdasarkan keputusan bupati nomor , sehingga saldo tahun 2023 sebesar NIHIL
2. Utang karena Putus Kontrak atas pekerjaan fisik dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Uraian KDP	Nama Rekanan	Nilai Kontrak	Kemajuan Fisik (%)	Nilai KDP	Kemajuan Keuangan (Rp)	Utang Aset Belum Dibayar
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Jumlah						

Penjelasan atas kemajuan fisik pekerjaan telah dijelaskan pada penjelasan Aset Tetap dhi. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

3.4.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar NIHIL.

3.4.2.3 R/K PPKD

Rekening ini merupakan rekening perantara yang digunakan oleh SKPD pada saat menerima SP2D dari BUD atau menyetor kas ke BUD. Saldo R/K PPKD sebelum konsolidasi per 31

Desember 2023 adalah sebesar NIHIL.

3.4.3 Ekuitas

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak (*claim*) ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas pada Neraca.....(Nama SKPD) Kabupaten Brebes per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp dan Rp . Perubahan atas ekuitas tahun 2023 dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

PERUBAHAN EKUITAS :	NILAI (Rp)
EKUITAS AWAL	88,266,282,163.21
Surplus/(Defisit)-LO	(5,812,090,021.07)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KEALAHAN MENDASAR :	
Koreksi Nilai Persediaan	47,582,402.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	9,995,666,561.00
Lain-lain	
EKUITAS AKHIR	92,497,441,105.14

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

3.5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (khusus BLUD)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Adapun rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2023 adalah sebagai berikut :

3.5.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Nilai SAL awal sebesar Rp merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2022. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2023.

3.5.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah seluruh SAL akhir tahun anggaran 2022. SAL tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp

3.5.3. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp

3.5.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL akhir pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp

3.6. Laporan Arus Kas (khusus BLUD)

3.6.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Pada Tahun 2023, terdapat Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp yang merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp dengan arus kas keluar sebesar Rp . Arus kas dari aktivitas operasi dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Penerimaan APBD		
Penerimaan BLUD		
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai		
Pembayaran Barang dan Jasa		
Pembayaran Bunga		
Pembayaran Subsidi		
Pembayaran Belanja Hibah		

Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		
Pembayaran Tidak Terduga		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		

3.6.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp dan Arus kas keluar sebesar Rp . Aliran kas dari aktivitas investasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin		
Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan		
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah		
Perolehan Peralatan dan Mesin		
Perolehan Bangunan dan Gedung		
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Perolehan Aset Tetap Lainnya		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		

3.6.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		
--	--	--

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp adalah selisih antara Arus kas masuk dan Arus kas keluar. Arus kas masuk dari aktivitas ini adalah sebesar Rp , sedangkan arus kas keluarnya adalah sebesar Rp . Aliran kas dari aktivitas pendanaan tahun 2023 dan tahun 2022 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman Daerah		
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman		
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Utang		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		

3.6.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, Beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp adalah selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp dan Arus kas keluar sebesar Rp . Aliran Kas dari

Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan Tahun 2022 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		

3.6.5. Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas

Kenaikan/penurunan kas bersih selama periode Tahun 2023 sebesar Rp menunjukkan adanya surplus realisasi APBD Tahun 2023 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih besar dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kenaikan kas bersih dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi		
Arus kas bersih dari aktivitas investasi		
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan		
Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris		
Jumlah		

3.6.6. Saldo Awal Kas di BLUD

Saldo kas awal merupakan saldo kas per 31 Desember 2023 yang tercatat dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional BLUD tahun 2023. Saldo Awal Kas di BLUD sebesar Rp

3.6.7. Saldo Akhir Kas di BLUD

Saldo Akhir Kas di BLUD sebesar Rp Selisih Kas akhir yang tercatat pada Neraca dengan Kas yang tercatat pada Laporan Arus Kas sebesar Rp Selisih tersebut merupakan ...

3.7. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan

penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Nilai surplus/(defisit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp .
Sedangkan nilai Surplus Defisit-LO sebesar Rp sehingga memiliki perbedaan sebesar Rp . Perhitungan perbedaan nilai secara keseluruhan hubungan LRA-LO dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Surplus/(Defisit) LRA	
Penambahan	
Pengurangan	
Surplus/(Defisit) LO	

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan disampaikan dalam **lampiran 3.7.1**

3.7.1. Penjelasan masing-masing pos terkait perbedaan pengakuan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

3.7.1.1. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA

Pendapatan Daerah	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6,040,622,537.80	5,993,068,300.00	47,554,237.80
Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan			-
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			-
Jumlah	6,040,622,537.80	5,993,068,300.00	47,554,237.80

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Selisih antara Pendapatan Asli Daerah-LO dengan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
PENDAPATAN ASLI DAERAH	6,040,622,537.80	5,993,068,300.00	(47,554,237.80)

a. Pendapatan Pajak Daerah

Selisih antara Pendapatan pajak-LO dengan pendapatan pajak-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Pajak Daerah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang pajak	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran pitang tahun sebelumnya	
Pengurangan koreksi catat ...	

Selisih	
---------	--

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih antara pendapatan retribusi-LO dengan pendapatan retribusi-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Retribusi Daerah	6,040,622,537.80	5,993,068,300.00	(47,554,237.80)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang retribusi	(47,554,237.80)
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran piutang retribusi tahun sebelumnya	
Pengurangan yang merupakan pendapatan diterima dimuka	
Selisih	

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang bagian laba/deviden	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran piutang bagian laba/deviden tahun sebelumnya	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

d. Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Lain-lain PAD yang Sah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang denda pajak	
Penambahan piutang denda retribusi	
Penambahan piutang denda keterlambatan pekerjaan	
Penambahan piutang pendapatan BLUD	
Penambahan piutang pendapatan	
Penambahan koreksi catat ...	

Pengurangan atas pembayaran piut. pokok dana bergulir tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. jasa dana bergulir tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. denda pajak tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. denda retribusi tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. denda keterlambatan pekerjaan tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. tahun sebelumnya	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

2. PENDAPATAN TRANSFER

Selisih Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional dan LRA

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang dana bagi hasil pajak pusat	
Penambahan piutang dana bagi hasil SDA pusat	
Penambahan piutang pendapatan	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran piut. Bagi hasil pajak pusat tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. Bagi hasil SDA pusat tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. tahun sebelumnya	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Transfer Antar Daerah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang dana bagi hasil pajak provinsi	
Penambahan piutang bantuan keuangan prov	

Penambahan piutang pendapatan	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran piut. Dana bagi hasil provinsi tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. Banuan keuangan provinsi tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. tahun sebelumnya	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

a. Pendapatan Hibah

Selisih antara Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Hibah-LO			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat th.	
Penambahan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya/Prov	
Penambahan piutang Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	
Penambahan piutang Sumbangan Pihak ketiga/sejenis	
Penambahan Hibah Masuk Persediaan	
Penambahan Hibah Masuk Aset Tetap	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya/Prov	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	
Pengurangan atas penerimaan piutang Sumbangan Pihak ketiga/sejenis	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	-

b. Dana Darurat

Selisih antara Dana Darurat-LO dengan Dana Darurat-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Dana Darurat-LO			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang Dana Darurat	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas penerimaan piutang Dana Darurat	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

- c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Selisih antara Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
-LO dengan Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang Pendapatan Hibah Dana BOS	
Penambahan piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah Dana BOS	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

4. SURPLUS NON OPERASIONAL

- a. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
1) Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			

Selisih Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan reklasifikasi hasil penjualan BMD ke Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan (<i>khusus PPKD</i>)	

Uraian	(Rp)
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan selisih penjualan barang RB BMD	
Pengurangan selisih penghapusan/pemusnahan BMD	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

2) Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			

Selisih Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan selisih tukar-menukar BMD	
Pengurangan selisih hibah BMD	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

3) Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			

Selisih Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan selisih tukar-menukar BMD	
Pengurangan selisih hibah BMD	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

4) Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO			

Selisih Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang Pelepasan Investasi Jangka Pendek	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pelepasan Investasi Jangka Pendek	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

1) Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO			

Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan surplus penyelesaian utang pemerintah pusat	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

2) Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO			

Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Surplus Penyelesaian Utang kepada LK. Bank	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

3) Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO			

Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Surplus Penyelesaian Utang kepada LK. Bukan Bank th. 2022	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

4) Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO			

Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

5) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO			

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO dijelaskan sebagai berikut :

3.7.1.2. Pengungkapan Perbedaan Beban-LO dengan Belanja-LRA

3.7.1.2.1. Beban Operasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pegawai	10,140,996,773.00	10,056,080,934.00	(84,915,839.00)
Beban Barang dan Jasa	5,239,689,955.87	5,259,951,927.00	20,261,971.13
Beban Bunga			-
Beban Subsidi			-
Beban Hibah			-
Beban Bantuan Sosial	96,000,000.00	96,000,000.00	-
Beban Penyisihan Piutang			-
Beban Lain-lain			-
Beban Penyusutan dan Amortisas	1,890,663,888.00		(1,890,663,888.00)
Jumlah	15,476,686,728.87	15,412,032,861.00	(64,653,867.87)

1. Beban Pegawai

Selisih Beban Pegawai pada LO dan Belanja Pegawai pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6,530,810,739.00	6,469,321,741.00	(61,488,998.00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Gaji dan Tunjangan ASN	61,488,998.00
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Gaji dan Tunjangan ASN	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	61,488,998.00

b. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tambahan Penghasilan ASN	3,364,010,399.00	3,340,583,558.00	(23,426,841.00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN	23,426,841.00
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	23,426,841.00

c. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	
Penambahan koreksi catat ...	

Uraian	(Rp)
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

d. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

e. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

f. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	

Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

g. Beban Pegawai BOS

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pegawai BOS			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan koreksi catat ...	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	

h. Beban Pegawai BLUD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pegawai BLUD			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan koreksi catat ...	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	

2. Beban Barang dan Jasa

Selisih beban barang dan jasa pada LO dengan belanja barang dan jasa pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Persediaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang	682,433,499.87	653,035,180.00	(29,398,319.87)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Saldo Awal	
Penambahan Reklas dari Belanja Tak Terduga	

Penambahan Reklas Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Mutasi Masuk	
Penambahan Hibah Masuk	
Penambahan Hutang Persediaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Persediaan	
Pengurangan Koreksi Saldo Awal	
Pengurangan Mutasi Keluar	
Pengurangan Hibah Keluar	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Ekstrakomptabel	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Kadaluarsa/Usang/Rusak	
Selisih	

b. Beban Jasa

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Jasa	3,662,555,787.00	3,712,216,078.00	49,660,291.00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Reklas dari Beban Dibayar di Muka\	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Jasa	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Dibayar di Muka	
Selisih	

c. Beban Pemeliharaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan	224,435,000.00	224,435,000.00	

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Pemeliharaan	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	

d. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Perjalanan Dinas	670,265,669.00	670,265,669.00	

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Perjalanan Dinas	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Perjalanan Dinas	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	

- e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Pengurangan Reklas ke Beban Hibah	
Pengurangan Reklas ke Beban Bantuan Sosial	
Selisih	

- f. Beban Barang dan Jasa BOS

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang dan Jasa BOS			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Pengurangan Reklas ke Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Perjalanan Dinas	
Pengurangan Reklas ke Beban Hibah	

Uraian	(Rp)
Pengurangan Reklas ke Beban Bantuan Sosial	
Selisih	

g. Beban Barang dan Jasa BOS

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang dan Jasa BLUD			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Pengurangan Reklas ke Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Perjalanan Dinas	
Pengurangan Reklas ke Beban Hibah	
Pengurangan Reklas ke Beban Bantuan Sosial	
Selisih	

h. Beban Barang dan Jasa BLUD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang dan Jasa BLUD			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklas dari Beban Dibayar di Muka	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Pengurangan Reklas ke Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Perjalanan Dinas	
Pengurangan Reklas ke Beban Hibah	
Pengurangan Reklas ke Beban Bantuan Sosial	
Pengurangan Reklas dari Beban Dibayar di Muka	

Uraian	(Rp)
Selisih	

3. **Beban Bunga**

Selisih beban bunga LO dengan belanja bunga pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. **Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat**

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat	
Selisih	

b. **Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain**

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	
Selisih	

c. **Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)**

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	

Penambahan Utang Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	
Selisih	

d. Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	
Selisih	

e. Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat	
Selisih	

f. Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD - Jangka Pendek

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek	
Selisih	

g. Beban Bunga Utang Pinjaman

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang Pinjaman			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bunga Utang Pinjaman	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang Pinjaman	
Selisih	

4. **Beban Subsidi**

Selisih beban subsidi LO dengan belanja subsidi pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Subsidi kepada BUMN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Subsidi kepada BUMN			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Subsidi kepada BUMN	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Subsidi kepada BUMN	
Selisih	

b. Beban Subsidi kepada BUMD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Subsidi kepada BUMD			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Subsidi kepada BUMD	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Subsidi kepada BUMD	
Selisih	

c. Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	
Selisih	

d. Beban Subsidi kepada Koperasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Subsidi kepada Koperasi			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Subsidi kepada Koperasi	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Subsidi kepada Koperasi	
Selisih	

5. Beban Hibah

Selisih Beban Hibah LO dengan Belanja Hibah pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklas dari Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Hutang Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke Pem. Pusat	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke Pem. Pusat	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke B. Persediaan	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	
Selisih	

b. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklas dari Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Hutang Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke Pem. Daerah Lainnya	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke Pem. Daerah Lainnya	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke B. Persediaan	

Uraian	(Rp)
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Selisih	

c. Beban Hibah kepada BUMN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah kepada BUMN			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklas dari Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Hutang Beban Hibah kepada BUMN	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke BUMN	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke BUMN	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke B. Persediaan	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada BUMN	
Selisih	

d. Beban Hibah Uang kepada BUMD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah Uang kepada BUMD			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Hibah Uang kepada BUMD	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	

Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke BUMD	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke BUMD	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah Uang kepada BUMD	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	

- e. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Pengurangan Reklas ke Beban Bantuan Sosial	
Selisih	

- f. Beban Hibah Dana BOS

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah Dana BOS			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Selisih	

g. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Selisih	

6. Beban Bantuan Sosial (khusus SKPD pengelola Bansos)

Selisih Beban Bantuan Sosial LO dengan Belanja Bantuan Sosial pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklas dari Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Hutang Beban Bansos Uang Kepada Individu	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan kepada individu	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap kepada individu	
Pengurangan Koreksi Catat ...	

Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke B. Persediaan	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada individu	
Selisih	

b. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklas dari Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Hutang Beban Bansos Kepada Keluarga	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan kepada keluarga	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap kepada keluarga	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke B. Persediaan	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada keluarga	
Selisih	

c. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
eban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	

Penambahan Reklas dari Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Hutang Beban Hibah kepada kelompok Masyarakat	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan kepada kelompok masyarakat	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap kepada kelompok masyarakat	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke B. Persediaan	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada kelompok masyarakat	
Selisih	

d. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Hibah Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	

Selisih	
---------	--

7. Beban Penyisihan Piutang

Selisih Beban Penyisihan Piutang LO dengan LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah atas penerimaan piutang	
Selisih	

b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Retribusi Daerah	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Retribusi Daerah atas penerimaan piutang	
Selisih	

c. Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan - Piutang Bag. Laba yang biagikan kpd Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pd BUMD	

Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan atas penerimaan Piutang Bag. Laba yang biagikan kpd Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pd BUMD	
Selisih	

d. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan BLUD	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Hasil Eksekusi Atas Jaminan	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Pokok)	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Jasa)	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - TP-TGR	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda Pajak Daerah	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda Retribusi Daerah	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang BLUD	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Hasil Eksekusi Atas Jaminan	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Pokok)	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Jasa)	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang TPTGR	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	
Selisih	

e. Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Desa	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat atas penerimaan piutang Dana Perimbangan	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat atas penerimaan piutang Dana Insentif Daerah	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat atas penerimaan piutang Dana Desa	
Selisih	

f. Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah - Bagi Hasil Pajak Prov	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah atas penerimaan piutang Bagi Hasil Pajak Prov	
Selisih	

g. Beban Penyisihan Piutang Lainnya

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Lainnya			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)

Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar TGR	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lainnya atas penerimaan piutang Bagian Lancar TGR	
Selisih	

3.7.1.2.2. Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran.

1. Beban Penyusutan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	409,073,858.00		(409,073,858.00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,480,717,030.00		(1,480,717,030.00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	873,000.00		(873,000.00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			-
Beban Penyusutan Aset Lainnya			-
Jumlah	1,890,663,888.00		(1,890,663,888.00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyusutan	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (tambah)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (kurang)	
Selisih	

2. Beban Amortisasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Amortisasi	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (tambah)	

Pengurangan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (kurang)	
Selisih	

3.7.1.2.3. Beban Transfer

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bagi Hasil			
Beban Bantuan Keuangan			
Jumlah			

1. Beban Bagi Hasil

Selisih Beban Bagi Hasil LO dan Belanja Bagi Hasil LRA adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa			
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa			
Jumlah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	
Penambahan Utang Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban (tambah)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban (kurang)	
Selisih	

2. Beban Bantuan Keuangan

Selisih Beban Bantuan Keuangan LO dan Belanja Bantuan Keuangan LRA adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi			
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota			

Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota			
Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi			
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa			
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota			
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik			
Jumlah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bantuan Keuangan ke Desa	
Penambahan Utang Beban Bantuan Keuangan ke Partai Politik	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban (tambah)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bantuan Keuangan ke Desa	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bantuan Keuangan ke Partai Politik	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban (kurang)	
Selisih	

3.7.1.2.4. Beban Tidak Terduga

Selisih Beban Tidak Terduga LO dan Belanja Tidak Terduga LRA sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tidak Terduga			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Tidak Terduga	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Tidak Terduga	
Pengurangan Reklasifikasi ke Beban Persediaan	
Selisih	

3.7.1.2.5. Defisit Non Operasional

1. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Selisih Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO dengan LRA sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO			
Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			
Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO			
Jumlah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Defisit Penjualan BMD	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Selisih	

2. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Selisih Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO dengan LRA sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO			
Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO			
Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO			
Defisit Penyelesaian Obligasi-LO			
Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO			
Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO			
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO			
Jumlah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Defisit Utang	
Penambahan Defisit Obligasi	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Selisih	

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 UMUM

Kabupaten Brebes memiliki eksistensi untuk membangun kompetensi daerah yang berbeda saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki meliputi sumber daya manusi, ilmu pengetahuan dan tekhnologi demi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016, ...(Nama SKPD)... Kabupaten Brebes memiliki Tugas Pokok

4.2 ORGANISASI

Struktur Organisasi SKPD(Nama SKPD) Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Kepala(Nama SKPD), membawahi : *(disesuaikan dengan kondisi SKPD)*

1. Kepala ;
2. Sekretaris :
 - a. *Sub Bagian Program dan Keuangan;*
 - b. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.*
3. *Bidang*
 - a. *Seksi*
 - b. *Seksi*
 - c. *Seksi*
4. *dst.....*
5. *Kelompok Jabatan Fungsional;*
6. *Unit Pelaksana Teknis.*

4.3 PERSONALIA

.....(Nama SKPD) Kabupaten Brebes memiliki..... personil, terdiri dari orang Kepala , orang Kepala Bidang, orang Kasubag/Kasi, orang staf di mana orang adalah PNS dan orang adalah tenaga kontrak/tenaga harian lepas.

BAB V
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan(Nama SKPD) Kabupaten Brebes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2023. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

(..... SKPD/BLUD.....)
KABUPATEN BREBES

(...NAMA KEPALA SKPD....)